

PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PUNGUT
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)
CABANG JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

Agus Widianto

NIM. 990903101104

Dosen Pembimbing :

Drs. SUTRISNO, M Si

NIP. 131 472 794

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

S
Klass

336.271

WID

P

dan

G.1

19 NOV 2002

PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PUNGUT
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Ahli Madya (AMd) Perpajakan

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Oleh :

AGUS WIDHIANTO

NIM: 990903101104

Dosen Pembimbing :

Drs. SUTRISNO, M.Si

NIP. 131 472 794

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : AGUS WIDHIANTO
NIM : 990103101104
Jurusan : Ilm.u Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PUNGUT
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER

Jember, 18 Juni 2002
Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Drs. SUTRISNO, M.Si
NIP. 131 472 794

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

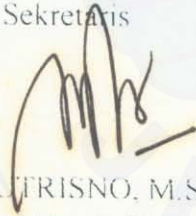
Nama : AGUS WIDHIANTO
NIM : 990903101104
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : D III Perpajakan

PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PUNGUT
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Juli 2002
Jam : 18.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

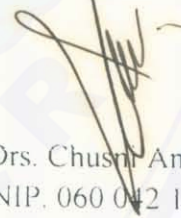
Panitia Penguji

Sekretaris



Drs. SUFRISNO, M.Si
NIP. 131 472 794

Ketua



Drs. Chusni Anies
NIP. 060 042 152

Mengesahkan,

Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 30 524 832

MOTTO

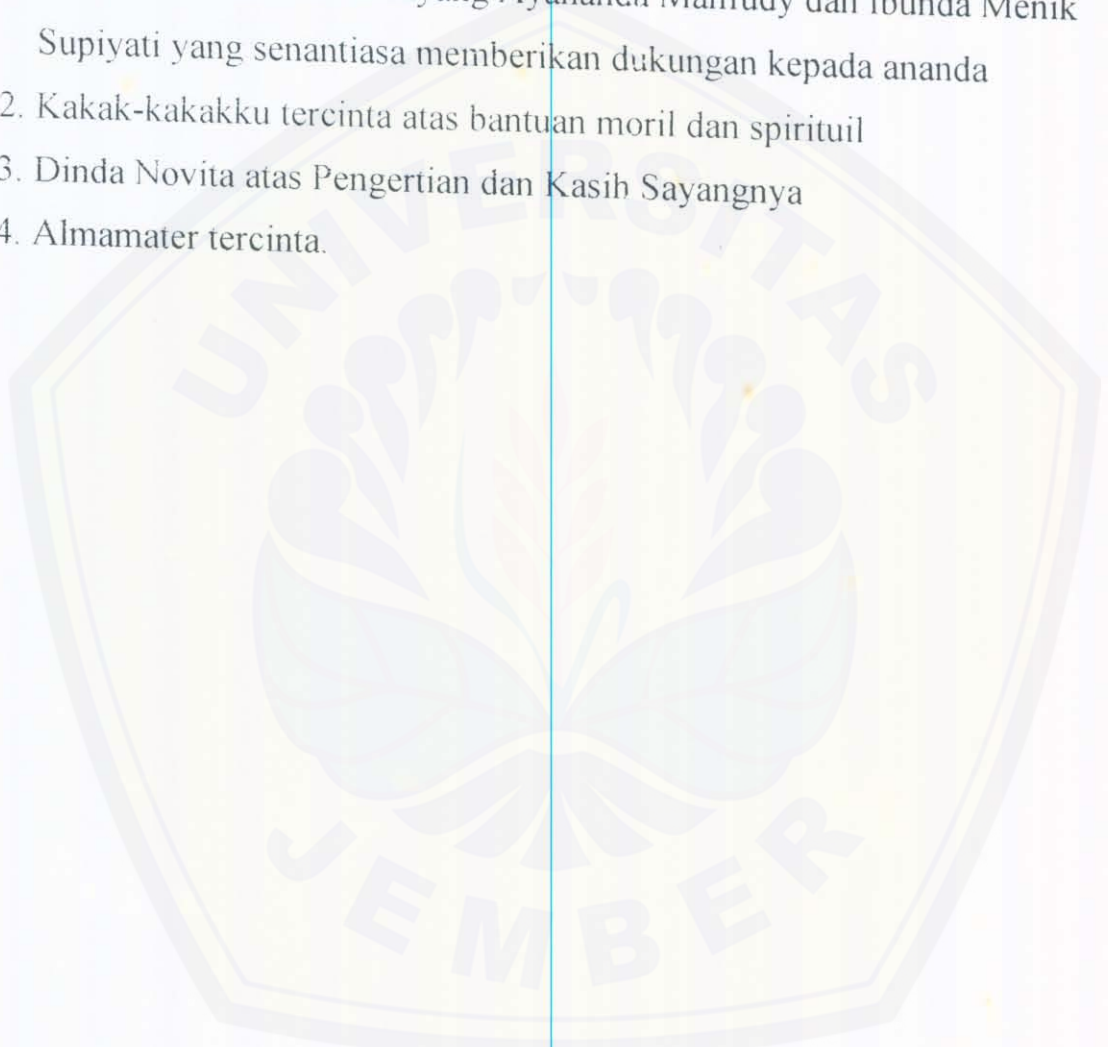
Bayarlah Pajak Sejak Dini, Agar Anak Cucu Kelak Tidak Menuduh
Bahwa Kita Telah Hidup Tidak Berguna
(Berita Pajak No. 1391 Maret 2001)



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

1. Yang terhormat dan tersayang Ayahanda Mahfudy dan Ibunda Menik Supiyati yang senantiasa memberikan dukungan kepada ananda
2. Kakak-kakakku tercinta atas bantuan moril dan spirituil
3. Dinda Novita atas Pengertian dan Kasih Sayangnya
4. Almamater tercinta.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji sukur kehadirat Alloh SWT atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan hasil Praktek Kerja Nyata ini, dengan judul “Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut Pada Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember”. Laporan Praktek Kerja nyata ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan pada Diploma III Perpajakan pada fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam melaksanakan Praktek Kerja Nyata dan penyelesaian laporan ini penulis banyak mendapat bimbingan, bantuan saran dan petunjuk dari semua pihak secara langsung maupun tidak langsung yang tidak terhingga nilainya, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

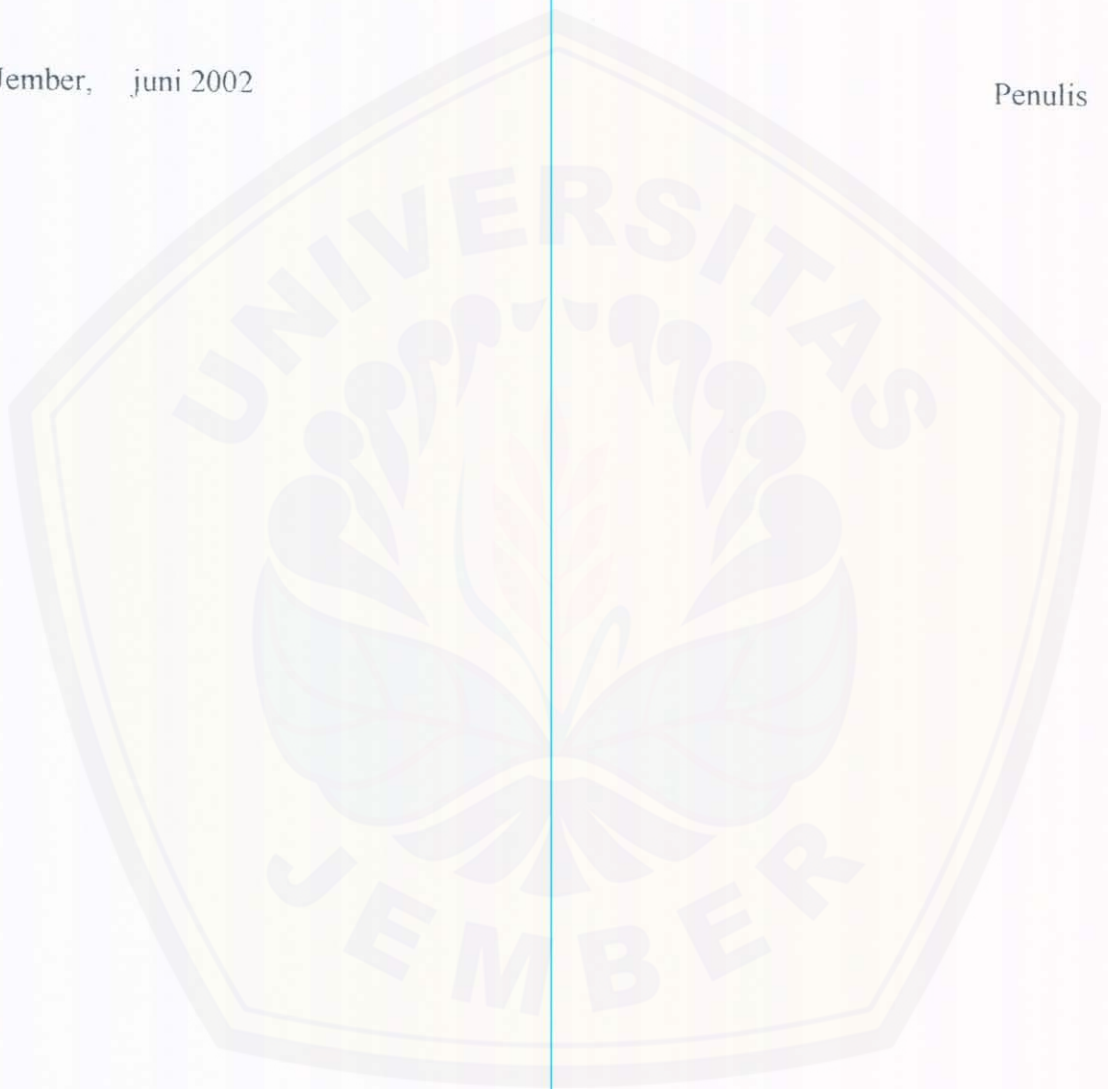
1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki ; selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, beserta staff.
2. Bapak Drs. Mud’har Syarifudin, M.Si ; selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si; selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Bapak Drs. Sutrisno, M.Si; selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga laporan ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Drs. Djoko Poernomo, M.Si; selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan saran dan membantu kelancaran studi penulis.
6. Bapak Abdul Azis ; selaku Kepala Cabang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember beserta staff yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam pelaksanaan program Praktek Kerja Nyata.

7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan , semangat, dan dorongan kepada penulis sehingga tugas ini dapat diselesaikan.

Akhirnya penulis berharap semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, juni 2002

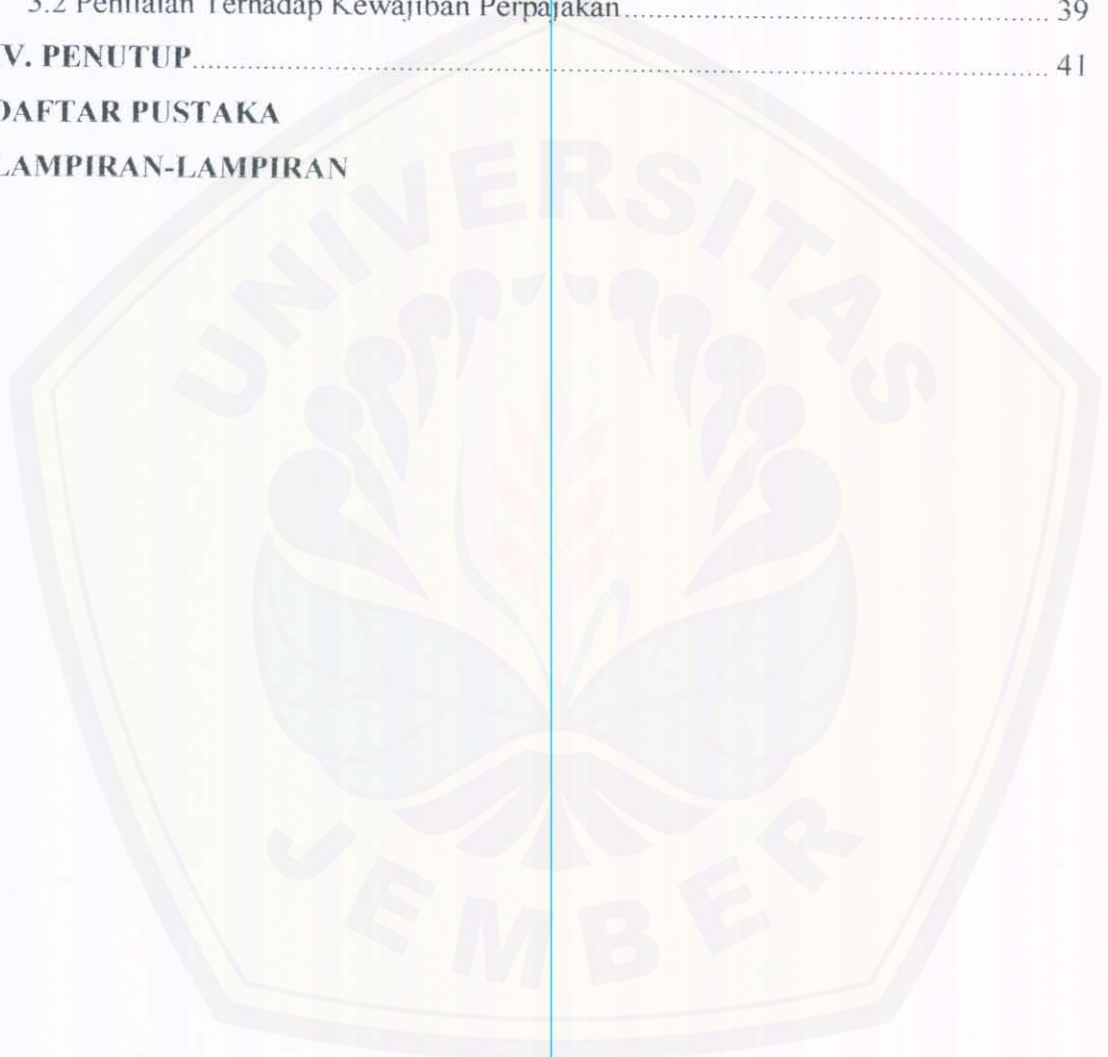
Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	5
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN BANK TABUNGAN NEGARA	7
2.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara	7
2.1.1 Sejarah Singkat PT. Bank Tabungan Negara	7
2.1.2 Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara	8
2.2 Struktur Organisasi	12
2.3 Pembagian Tugas	14
2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank Tabungan Negara	18
2.5 Misi PT. Bank Tabungan Negara	19
2.6 Tenaga Kerja	19
2.7 Jadwal Kerja	20
III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	22
3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	22
3.1.1 Konsep Pajak Pertambahan Nilai	25

3.1.2 Mekanisme Pengenaan PPN berdasarkan UU PPN No 18 Tahun 2000.....	26
3.1.3 Diskripsi Kegiatan Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut pada PT. BTN (Persero) Cabang Jember	29
3.2 Penilaian Terhadap Kewajiban Perpajakan.....	39
IV. PENUTUP.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

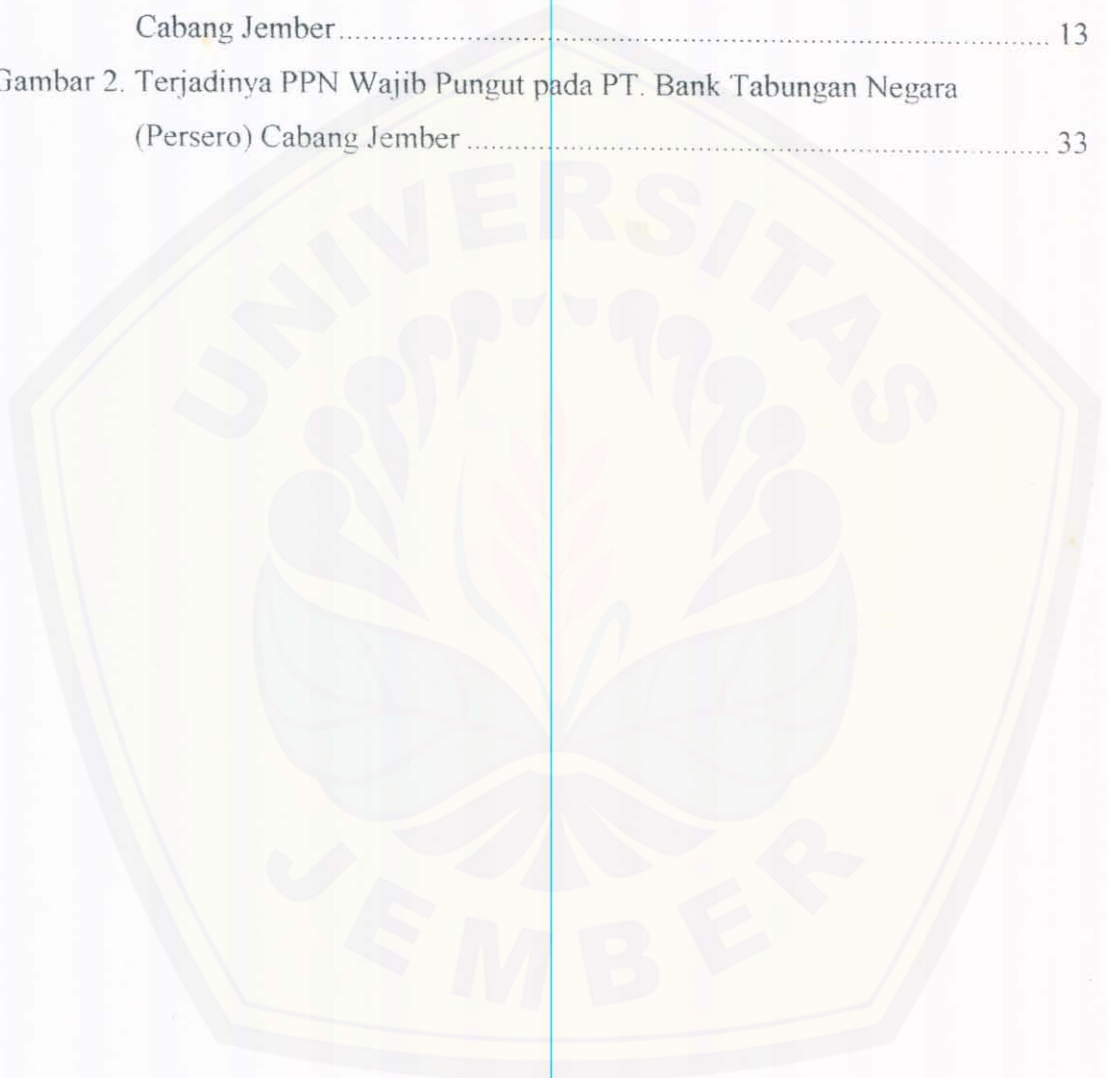


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jabatan dan Jumlah Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	20
Tabel 2. Jadwal Kerja Karyawan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	21
Tabel 3. Kegiatan Penulis selama mengikuti PKN pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	24
Tabel 4. Transaksi yang menimbulkan PPN Masukan	31
Tabel 5. Pembelian ATK bulan februari 2002	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember.....	13
Gambar 2. Terjadinya PPN Wajib Pungut pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember	33





I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan suatu sistem perekonomian nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi menuju tercapainya tujuan nasional yaitu masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan YME berdasarkan Pancasila, maka perlu diolah segala sumber penerimaan negara dengan menggunakan segala potensi yang semaksimal mungkin.

Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang penting untuk mengatur, mengawasi, menstabilkan, mengarahkan serta mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu menjadi pelopor yang menggerakkan dan memajukan perekonomian. Agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka dibentuklah Aparatur Negara, Lembaga-Lembaga Pemerintah, Departemen-departemen, Dinas-dinas, Bank Sentral dan lembaga keuangan lainnya.

Untuk membiayai semua kegiatan pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya di perlukan dana yang tidak sedikit. Dana dan sumber penerimaan negara yang akan digunakan oleh negara sebagai mana pendapat T. Gilarso (1991:190-191) di peroleh dari :

1. Pajak

Pajak adalah sumbangan wajib yang dipungut pemerintah yang sah (resmi) tanpa adanya balas jasa (kontra-prestasi) yang secara langsung diterima oleh pembayar pajak (T. Gilarso, 1991:190)

Menurut K.Rimsky Judisseno (1997:7) mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dengan undang-undang dan peraturan-peraturan untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

Dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan suatu kewajiban warga negara untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya kepada negara yang diatur dengan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa langsung dari negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara berupa pembangunan nasional.

2. Penerimaan bukan Pajak (*non - tax*)

Penerimaan bukan Pajak (*non-tax*) ialah penerimaan pemerintah dari sumber-sumber seperti: laba perusahaan negara atau daerah, bagi hasil dengan perusahaan asing, retribusi, hasil lelang, denda, dan sebagainya (T.Gilarso, 1991:190)

3. Pinjaman

Pinjaman berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Untuk pinjaman dalam negeri pemerintah biasanya meminjam uang dari Bank Indonesia dalam bentuk uang muka dan penjualan obligasi negara. Sedangkan pinjaman dari luar negeri di peroleh dari lembaga-lembaga Internasional seperti IMF dan Bank Internasional.

4. Penciptaan Uang

Pemerintah juga mencetak uang guna membiayai penyelenggaraan tugas pemerintah, dalam hal ini di serahkan kepada Bank Sentral.

5. Bantuan Luar Negeri

Bantuan ini diperoleh dari pemerintahan negara lain maupun dari pihak swasta dan lembaga Internasional seperti : UNESCO, UNICEF, FAO dan WHO.

Pembangunan di negara berkembang seperti Indonesia akan melaju secara mandiri apabila pembangunan itu sebagian besar dapat di biayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan tidak selalu tergantung pada sumber pembiayaan luar negeri. Dengan demikian negara berkembang akan lebih mampu untuk mengatasi gejolak ekonomi dunia, karena ketahanan ekonomi dalam negeri yang kuat. Sumber pembiayaan dalam negeri yang di maksud adalah **pajak**. Pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya yang disebut fungsi *Budgetair* dan juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatur atau melaksanakan kegiatan perekonomian nasional yang di sebut fungsi *Regulerend*,

serta sebagai sarana untuk memajukan keadilan sosial dengan jalan pemerataan masyarakat (Munawir, 1999:5)

Kewajiban perpajakan merupakan salah satu perwujudan dari pengabdiaan warga negara. Peran serta masyarakat sebagai wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama menanggung pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan. Tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan terletak di tangan masyarakat yang diberi kepercayaan untuk ikut melaksanakan kegotong-royongan Nasional dengan jalan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terhutang kepada negara. Ini dikenal dengan sistem "*Self Assesment*". Dalam sistem perpajakan ini aparat pajak tidak lagi menetapkan sendiri atau secara sepihak jumlah pajak yang terhutang, melainkan bertugas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, serta menerapkan sanksi administrasi terhadap mereka yang melanggar peraturan perpajakan. Dengan demikian pelaksanaan administrasi perpajakan dapat terkendali, lebih rapi, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat (Waluyo, Wirawan, 1999:12)

Untuk mendukung jalannya perpajakan di perlukan hubungan baik antara pemerintah dengan, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pos dan Giro serta lembaga keuangan. Perbankan sebagai lembaga keuangan memegang peranan penting terhadap roda perekonomian nasional serta merupakan aparatur yang berkewajiban membantu menanggulangi masalah negara dibidang kesejahteraan rakyat yang salah satunya dengan jalan memberikan kredit lunak kepada masyarakat. Bank Tabungan Negara (Persero) sebagai Bank Umum Pemerintah dan sekaligus Bank Persepsi yaitu bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima setoran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan penerimaan pajak lainnya. Bank Tabungan Negara juga merupakan wajib pajak badan, wajib potong PPh, wajib pungut PPN dan PPnBM sesuai peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang perpajakan yang baru No.16 tahun 2000 diharapkan setiap pihak yang terkait dengan perpajakan diwajibkan untuk lebih memahami sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan yang dilakukan oleh

pihak-pihak yang terkait didalamnya. Pihak yang terkait tersebut secara khusus yaitu wajib pajak dan aparat pajak. Mahasiswa Universitas Jember khususnya Diploma III Perpajakan yang juga terkait dalam pelaksanaan Undang-Undang perpajakan yang nantinya diarahkan sebagai pihak yang berada diantara wajib pajak dan aparat pajak yaitu sebagai konsultan pajak misalnya, tidak lepas dari tuntutan untuk memahaminya agar dalam pelaksanaannya sebagai pihak yang akan menjadi jembatan antara wajib pajak dan petugas pajak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Agar mahasiswa mengetahui keadaan yang sebenarnya dilapangan dan bukan hanya sekedar teori yang diterima dibangku kuliah maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember khususnya Diploma III Perpajakan mengharuskan mahasiswanya untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pengelolah program Diploma III Perpajakan mengharuskan dikantor-kantor non Kantor Pelayanan Pajak (BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, Koperasi dll) sebagai obyek Praktek Kerja Nyata.

Dalam hal ini penulis memilih PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember sebagai obyek Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan alasan:

1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Jember adalah Bank Umum Pemerintah yang telah ditunjuk sebagai badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.547/KMK.04/2000.
2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember selain berfungsi sebagai lembaga pembiayaan perumahan, melayani setoran nasabah juga sebagai wajib pajak badan, wajib potong pajak penghasilan dan wajib pungut PPN & PPnBM.

Dengan alasan tersebut diatas maka penulis ingin membuat laporan hasil Praktek Kerja Nyata sebagai tugas akhir penulis dengan judul **“Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember”**

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk:

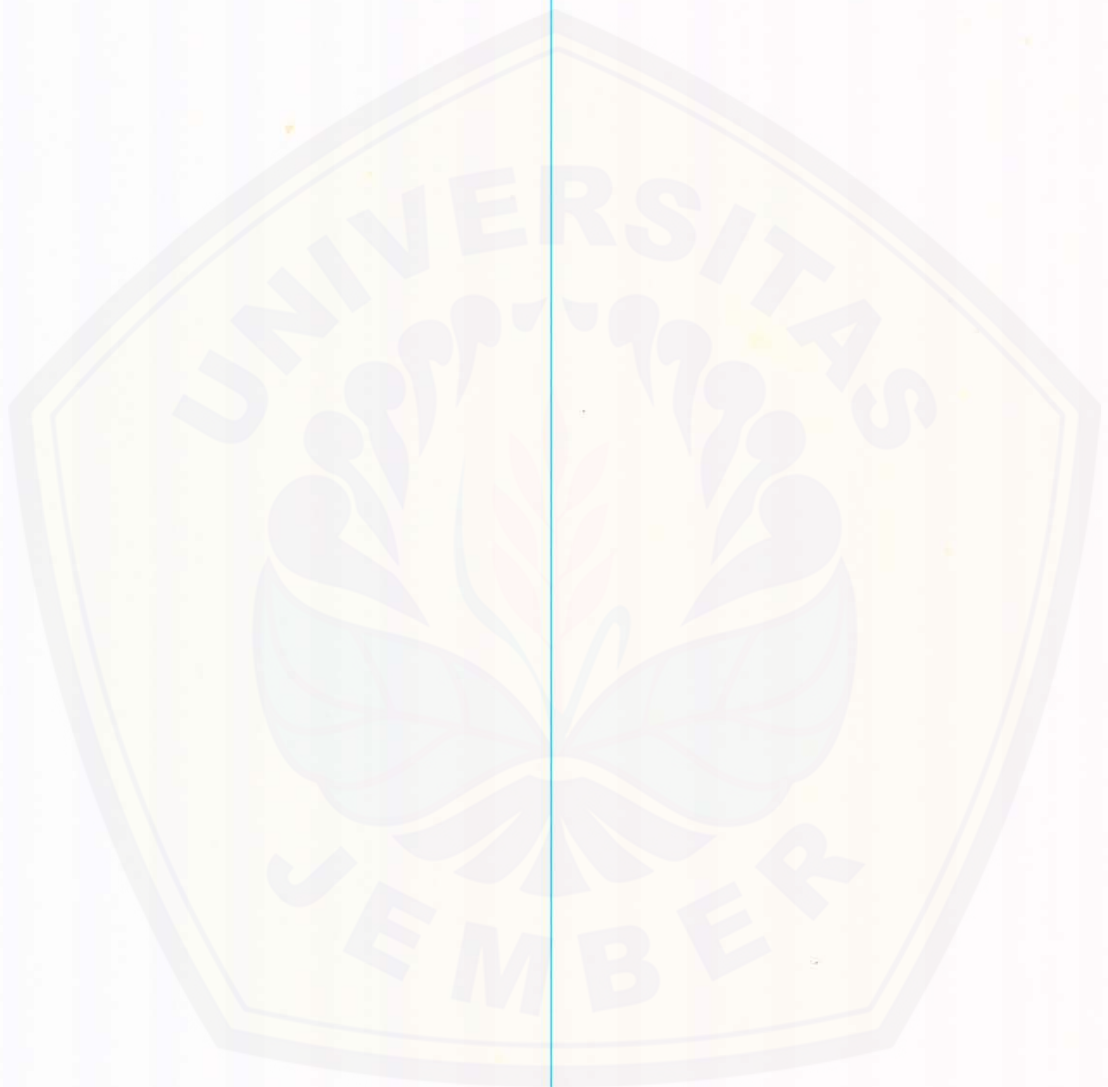
- a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktek perpajakan yang benar-benar terjadi, khususnya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember
- b. Dapat dijadikan sebagai bekal dalam berhubungan langsung dengan pekerjaan pada umumnya dan dalam bidang perpajakan pada khususnya.
- c. Memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang Perpajakan.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Praktek Kerja Nyata adalah:

- a. Bagi Perusahaan
Sebagai sarana pendukung antara perusahaan dengan lembaga pendidikan khususnya Diploma III Perpajakan Universitas Jember.
- b. Bagi Jurusan
 - 1) Sebagai sarana masukan dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kurikulum yang dibuat, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - 2) Memberikan pengetahuan baru yang mendukung kegiatan akademis sebagai bahan tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa atau yang berkepentingan pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- c. Bagi Penulis
 - 1) Ingin menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam menerapkan dan mengemukakan teori yang diperoleh dibangku kuliah terutama yang berkaitan dengan disiplin ilmu perpajakan.

- 2) Sebagai sarana untuk menguji kemampuan diri untuk mencoba memperoleh data yang benar, akurat, dapat dipertanggungjawabkan tentang apa yang ingin diketahui yang tidak didapatkan dibangku kuliah.





II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN BANK TABUNGAN NEGARA

2.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan Bank Tabungan Negara

2.1.1 Sejarah Singkat Bank Tabungan Negara

Bank Tabungan Negara bermula dari "*Postpaarbank*" yang didirikan berdasarkan *koninklijk Besluit* No.27 pada tahun 1887 tanggal 16 Oktober 1897, yang salah satu tujuan lembaga tersebut yaitu mendidik masyarakat agar gemar menabung. *Postpaarbank* kemudian diubah pada masa kedudukan Jepang menjadi "*Tyokin Kyoku*" pada tahun 1942.

Pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, "*Tyokin Kyoku*" diambil alih dan diberi nama "Kantor Tabungan Pos". Aktifitas Kantor Tabungan Pos ini terhenti pada bulan Desember 1948, akan tetapi dilanjutkan kembali di Yogyakarta pada bulan Juni 1949 kemudian diganti dengan "Bank Tabungan Pos". Selanjutnya dengan Undang-undang No.2 tahun 1964, Bank Tabungan Pos ditiadakan dan didirikan "Bank Tabungan Negara"

Pada tahun 1965 semua bank milik negara dilebur dalam suatu Bank tunggal yakni Bank Negara Indonesia (BNI), termasuk juga Bank Tabungan Negara Indonesia Unit V. Dalam era orde baru Bank Tabungan Negara Unit V kembali lagi menjadi Bank Tabungan Negara, ditata kembali berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 1968, dan diumumkan dalam lembaran Negara No.73 tahun 1968.

Sesuai dengan Undang-Undang No.20 tahun 1968, tugas diarahkan pada perbaikan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana-dana dari masyarakat, terutama dalam bentuk tabungan.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.B/49/MK/IV/I/1974 tanggal 29 Januari 1992, Bank Tabungan Negara telah ditunjuk sebagai wadah pembiayaan perumahan rakyat yang diwujudkan dengan kegiatan pemberian Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang pada saat itu telah

dikenal luas oleh masyarakat. Berdasarkan surat direksi Bank Indonesia No.22/9/DIR/UPG, Bank Tabungan Negara dapat menerima simpanan dalam bentuk Giro dan ikut serta dalam kliring.

Menginjak akhir pelita IV yang menandai akan berakhirnya PJPT I, melalui kebijakan deregulasi dibidang keuangan dan perbankan yang mencapai puncaknya dengan diundangkannya Undang-Undang perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No.7 tahun 1992, status dan fungsi bank pemerintah lebih dimantabkan dengan pemberian bentuk baru sebagai perusahaan perseroan.

2.1.2 Perkembangan Bank Tabungan Negara

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai Bank Tabungan Negara mulai sebelum menjadi Bank Tabungan Negara hingga sekarang, Bank Tabungan Negara telah mengalami perubahan, yang terdiri dari 9 (sembilan) periode yaitu:

a. Periode 1897-1905

Pada tahun 1897 adalah tahun "*kramat*" bagi BTN, karena pada saat itu berdasarkan *Koninklijk Besluit* No.27 tanggal 16 Oktober 1897 Hindia Belanda dibuka *Postpaarbank* yang berkedudukan di Batavia, yang kini dikenal dengan nama Jakarta. Tujuan *Postpaarbank* antara lain mendidik masyarakat agar gemar menabung dan memperkenalkan lembaga perbankan ke masyarakat luas. Sudah barang tentu tidak boleh diharapkan bahwa *postpaarbank* dalam tahun pertamanya sudah dapat membiayai sendiri usahanya dari sisa bunga yang didapat. Pemerintah harus memberikan persekot yang didalam tempo 7 tahun, kemudian persekot itu sudah dapat dibayar kembali.

b. Periode 1905-1939

Kurang lebih dalam 30 tahun kemudian, *postpaarbank* sudah maju dengan pesat, dengan meningkatnya jumlah nasabahnya. Pada tahun 1928 dibuka 4 cabang yaitu cabang Makasar yang diikuti dengan cabang Surabaya pada tahun 1931, kemudian cabang Jakarta dan Medan. Pada tahun 1934 dilakukan mekanisasi atas

rekening koran. Tahun 1939 tercatat saldo sebanyak 54 juta. Pencapaian ini sejalan dengan kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan pada masa itu.

c. Periode 1940-1945

Tahun 1940 Jerman menyerang *Nedherland*, terjadi pengambilan dana besar-besaran oleh para nasabah *postpaarbank*. Hanya dalam tempo beberapa hari sebanyak Rp. 11 juta dibayarkan kepada para nasabah. Hal ini tidak berlangsung lama. Tahun 1941 kepercayaan nasabah timbul kembali, dan pada tahun yang sama berhasil dihimpun dana sebesar Rp. 58,8 juta. Tahun 1942 terjadi suatu masa yang dinamakan "*masa antara*", karena tidak dapat dimasukkan ke sejarah Bank Tabungan Pos, yaitu antara 1942-1946 Jepang mengambil alih kekuasaan Kolonial belanda dan *postpaarbank* dibekukan. Pemerintah Jepang mendirikan *Tyokin Kyoku*. Misi gemar menabung *Tyokin Kyoku* gagal, karena hal tersebut dirasakan sebagai paksaan oleh rakyat Indonesia, dalam hal ini cabang Yogyakarta dibuka. Pendudukan Jepang di Hindia Belanda tidak berlangsung lama. Bangsa Indonesia kemudian memproklamkan kemerdekaannya, *Tyokin Kyoku* diambil alih dan diganti "Kantor Tabungan Pos", yang diprakarsai oleh Bpk. Darmosoetanto, direktur pertama Bank Tabungan Pos.

d. Periode 1946-1948

Tahun 1946 Kantor Tabungan Pos banyak mengambil bagian dalam penukaran uang Jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Sayang sekali keadaan tahun itu kurang memungkinkan/kurang aman. Berangsur-angsur Belanda menduduki daerah-daerah sehingga pada 19 Desember 1946 Kantor Tabungan Pos berhenti bekerja karena tidak punya daerah lagi.

e. Periode 1949-1958

Bulan Juni 1949 dengan restorasi Republik Indonesia, di Yogyakarta dibuka lagi "Bank Tabungan Pos Republik Indonesia" dengan maksud membereskan Kantor Tabungan Pos yang kacau. Tetapi kantor ini hanya dapat bekerja hingga akhir tahun 1949. Selanjutnya pemerintah hanya mengakui Bank Tabungan Pos RI

sebagai lembaga tabungan yang kemudian tahun 1950 diganti menjadi Bank Tabungan Pos.

Pada tahun 1950 pemerintah melakukan penyehatan keuangan dengan mengedarkan uang baru. Uang kertas lama digunting bagian kiri ditukarkan dengan uang baru dan yang kanan ditukarkan dengan obligasi pinjaman negara tahun 1950. Akibatnya uang Bank Tabungan Pos merosot dari posisi 73 juta menjadi 41 juta. Tahun 1953 keluar Undang-Undang No.36 tahun 1953 (L.N. No.86 tahun 1953) tentang Undang-Undang Bank Tabungan Pos tahun 1955. Empat daerah otonom mengadakan perjanjian pinjaman dengan Bank Tabungan Pos. Tahun 1956 ada 5 daerah otonom, tahun 1957 ada 13 daerah otonom dan tahun 1958 1 daerah otonom (sampai akhir mei 1958).

f. Periode 1958-1967

Tahun 1963 keluar Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (perpu) No.4 tahun 1963 (L.N. No.62 tahun 1963) tentang perubahan tambahan Undang-Undang No.36 tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos diganti menjadi "Bank Tabungan Negara". Tahun 1964 keluar Undang-Undang No.4 tahun 1964 (L.N. No.51 tahun 1964) tentang Bank Tabungan Negara yang mencabut Undang-Undang atau perpu sebelumnya. Tahun 1965 keluar penetapan presiden/Penpres No.8 tahun 1965 (L.N.No.45 tahun 1965) tentang pengintegrasian Bank-bank Umum dan tabungan pemerintah kedalam bank sentral. Dengan penpres no. 17 tahun 1965 Bank Tabungan Negara diintegrasikan ke Bank Indonesia. Pempres No.17 tahun 1965 pemerintah mendirikan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) dan BTN mulai tanggal 17 Agustus 1965 menjalankan usaha dengan nama BNI Unit V berdasarkan surat Keputusan Menteri Urusan Bank sentral Kep. No.64 UBS/65. Peraturan ini terus berlaku sampai tahun 1967 keluar Undang-Undang pokok perbankan (UU No.14 Tahun 1967).

g. Periode 1968-1974

Tahun 1968 keluar Undang-Undang No.20 tahun 1968 (L.N.No.73 tahun 1968 TLN No.2273) tentang pendirian Bank Tabungan Negara. Didalam Undang-

Undang tersebut tugas pokok BTN diarahkan pada perbaikan ekonomi rakyat dan perbaikan ekonomi nasional dengan jalan menghimpun dana dari masyarakat terutama dalam bentuk tabungan. Tahun 1974 berdasarkan surat menteri keuangan RI No.B/49/MK/IV/1/1974 tanggal 29 Januari 1974 BTN ditunjuk sebagai wadah pembayaran proyek pembangunan perumahan rakyat. Penunjukan ini adalah pelaksanaan Pelita I buku II Bab 19 tentang program perumahan rakyat yang menentukan adanya Bank hipotik perumahan sebagai salah satu lembaga yang menangani masalah perumahan rakyat. Pada tahun 1974 ini juga BTN mengadakan persiapan-persiapan operasional kredit perumahan yang kelak terkenal dengan KPR-BTN.

h. Periode 1975-1991

Pada tanggal 23 April 1976 dilakukan realisasi KPR yang pertama di Semarang, yang kemudian berlanjut dari tahun-ketahun, mencapai puncaknya tahun 1982/1983. Guna membiayai KPR tersebut, BTN harus mampu mengerahkan dana dari masyarakat. Untuk itu diversifikasi produk yang bersifat "operasi pasifa" harus dilaksanakan. Sejak tahun 1976 pertumbuhan aset BTN meningkat tajam dari Rp.11 Milyard pada akhir 1976, menjadi Rp.3,7 trilyun pada akhir 1991.

9. Periode 1992 - sekarang

Pada tahun ini berlaku Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan. Maka bentuk hukum BTN menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Pendirian PT. Bank Tabungan Negara tersebut berdasarkan akte pendirian No.136 tanggal 31 Juli 1992. Perusahaan tersebut menjadikan gerak BTN menjadi leluasa, dari Bank tabungan dan sebagai lembaga pembiayaan perumahan menjadi Bank Umum mulai 1 Agustus 1992.

Sedangkan Bank Tabungan Negara Cabang Jember baru diadakan dan diresmikan tepatnya pada tanggal 12 Januari 1991 oleh Prof. Dr. Adrianus Mooy, selaku Gubernur Bank Indonesia. Dengan dibukanya BTN di Jember, maka penanganan administrasi KPR menjadi semakin mudah untuk daerah Jember dan sekitarnya, karena sebelum dibukanya Cabang BTN di Jember untuk penanganan

masalah administrasi KPR adalah BTN Cabang Malang sebagai pengelolah. BTN Cabang Jember mempunyai wilayah kerja se-karisidenan Besuki antara lain: Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Jember. Untuk wilayah kerja tersebut diatas dalam pelayanan kepada masyarakat melalui kantor kas yang ada.

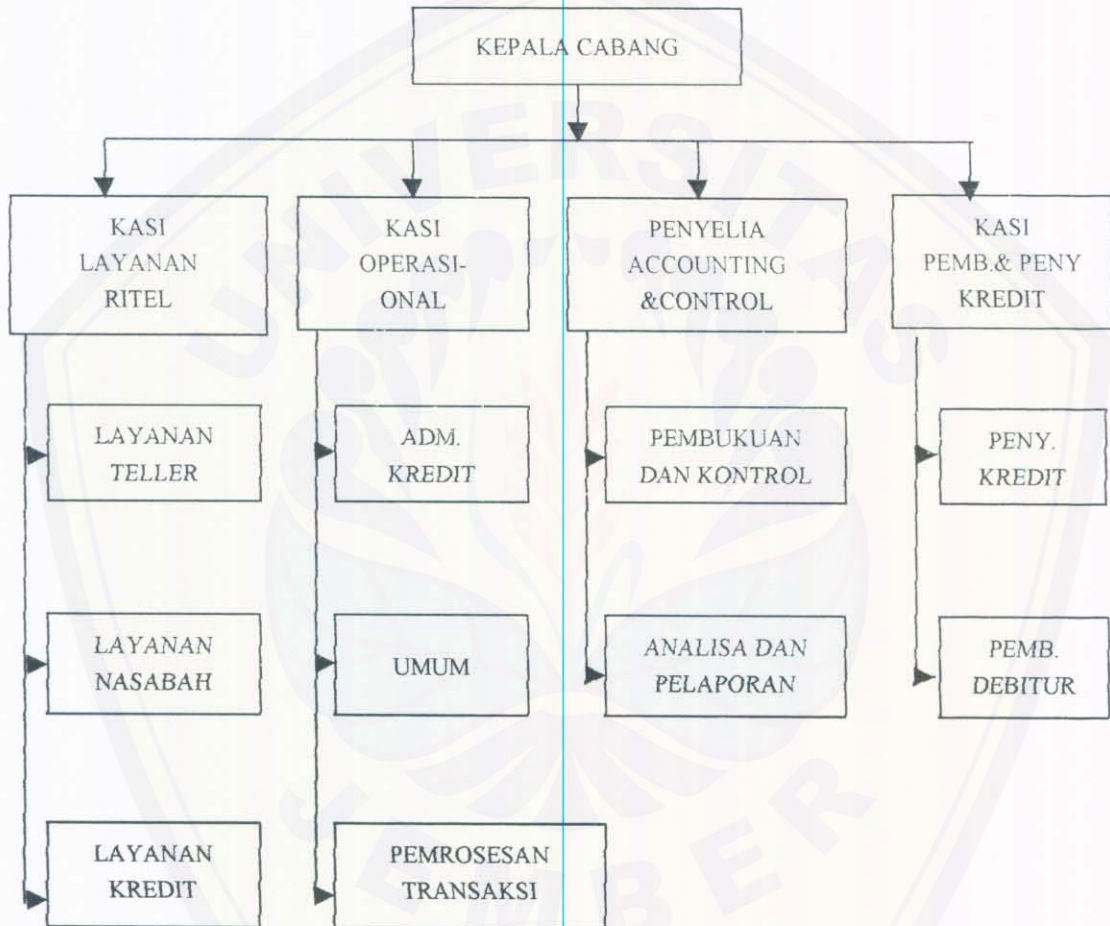
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jember

Struktur organisasi adalah gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama dari orang-orang yang terdapat pada organisasi dalam rangka pencapaian suatu tujuan (Basu Swastha, 1999:108). Struktur organisasi dalam suatu perusahaan bertujuan untuk penentuan kegiatan-kegiatan dan tanggungjawab serta pendelegasian wewenang untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan tersebut.

Susunan organisasi serta pembagian tugas (*Job Discription*) yang baik sangat membantu anggotanya secara efektif dan mudah mencapai tujuan yang diharapkan. Struktur organisasi sangat penting artinya dalam membina kerjasama diantara semua karyawan dan menjadi pedoman dengan menjalin hubungan kerja yang harmonis serta keakraban.

Secara skematis struktur organisasi pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
 STRUKTUR ORGANISASI
 PT.BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER
 Per 1 Januari 2002



Sumber data : PT. BTN (Persero) Cab. Jember

2.3 Pembagian Tugas (*Job Discription*)

Dari bagan struktur organisasi tersebut masing-masing bagian/seksi mempunyai tugas tersendiri antara lain:

1. Kepala Cabang

- a. Pengembangan Bisnis Cabang
- b. Mengelola hubungan dengan nasabah prima
- c. Menyiapkan perencanaan bisnis cabang
- d. Membimbing kampanye promosi serta upaya pemasaran
- e. Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan
- f. Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor pusat
- g. Menetapkan target kinerja untuk seluruh unit kerja Cabang
- h. Melakukan perencanaan sumber daya manusia
- i. Pengawasan dan persetujuan transaksi bisnis Cabang
- j. Mengambil keputusan bisnis
- k. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang tidak lazim
- l. Memotifasi bawahan dan rekan kerja

2. Kasi Pelayanan Ritel (*Kasi Retail Service*)

- a. Mengkoordinasi aktifitas layanan ritel
- b. Memastikan efisiensi dan efektifitas pemrosesan transaksi ritel
- c. Menjamin semua fungsi Dalam bidang ritel berjalan sesuai ketentuan
- d. Memberikan sasaran yang jelas kepada semua pegawai dibidangnya
- e. Membuat dan mengevaluasi anggaran dan rencana kerja secara periodik
- f. Mengembangkan dan mengelola hubungan baik dengan nasabah
- g. Memberikan persetujuan transaksi sesuai batas kewenangannya
- h. Melakukan penjualan produk jasa bank
- i. Mewakili BTN dalam acara resmi bila kacab berhalangan hadir.

3. Pelayanan Kredit (*Loan service*)

- a. Menjamin bahwa *Loan Service* memberikan pelayanan dengan kualitas prima

- b. Mengikuti perkembangan perekonomian, peluang bisnis dan persaingan untuk merebut pasar
 - c. Menjamin pencapaian target kredit yang telah ditentukan dengan portofolio kredit yang baik
 - d. Memastikan bahwa semua wawancara dilakukan dengan baik dan benar
 - e. Memastikan bahwa semua klaim dapat diselesaikan dengan benar dan baik
 - f. Menjamin keakuratan dan kecepatan proses kredit
 - g. Memastikan bahwa semua akad kredit berjalan dengan baik
4. Pelayanan Nasabah (*Customer service*)
- a. Memastikan efisiensi dan efektifitas pelayanan nasabah
 - b. Memastikan bahwa nasabah memperoleh pelayanan yang berkualitas
 - c. Memastikan bahwa *costumer Service* mempunyai pengetahuan dan sikap pelayanan yang profesional
 - d. Memastikan bahwa Cso menguasai segala seluk-beluk kredit
5. Layanan Teller (*Teller Service*)
- a. Memastikan efektivitas dan efisiensi proses di Teller
 - b. Melakukan persetujuan penarikan & pembayaran yang melebihi batas wewenang petugas teller
 - c. Memastikan bahwa semua nasabah memperoleh pelayanan prima
6. Kasi operasional
- a. Mengkoordinasi & mengsurvisi aktifitas bidang TP,LA, dan umum
 - b. Memastikan efisiensi dan efektifitas pemrosesan transaksi operasional harian
 - c. Menjamin efisiensi administrasi kredit dengan baik
 - d. Menjamin semua pegawai dalam bidangnya telah menerima pendidikan yang cukup
 - e. Menjamin semua fungsi operasioanal berjalan sesuai ketentuan
 - f. Memonitor kinerja cabang dan mengambil tindakan untuk perbaikan
 - g. Memberikan sasaran yang jelas kepada semua pegawai dibidangnya.

- h. Membuat dan mengevaluasi anggaran dan rencana kerja bidang operasional secara periodik
 - i. Mewakili BTN dalam acara resmi bila kepala cabang berhalangan
7. Umum (*General Branch*)
 - a. Menyelenggarakan administrasi personalia dan logistik
 - b. Mengkoordinasikan kebutuhan logistik cabang
 - c. Melakukan distribusi pegawai untuk menjamin kualitas SDM yang tinggi
 - d. Mengajukan penambahan atau pengurangan pegawai sesuai kebutuhan cabang
 - e. Melakukan pengendalian penggunaan biaya
8. Pemrosesan Transaksi (*Transaction Processing*)
 - a. Menjamin bahwa semua proses transaksi dilakukan dengan benar
 - b. Menjamin keakuratan dan kecepatan semua proses di pemrosesan transaksi
 - c. Menjamin bahwa semua transaksi dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku
 - d. Melakukan otorisasi transaksi sesuai kewenangan
 - e. Memegang dan pengesahan Test Key
9. Administrasi Kredit (*Loan Administration*)
 - a. Menjamin Kualitas administrasi kredit
 - b. Menjamin seluruh dokumen kredit disimpan dengan baik dan aman
 - c. Melakukan pemantauan kelengkapan dan keabsahan dokumen kredit
 - d. Memantau dan menindaklanjuti tingkat penyelesaian dokumen pokok dalam batas waktu penyelesaian yang telah ditentukan
10. Penyelia Akuntansi (*Penyelia Accounting & Control*)
 - a. Membina dan memberikan pengarahan kepada unit *Book Keeping & control* dan unit *finansial reporting*
 - b. Melakukan pengendalian intern cabang
 - c. Memastikan ketaatan cabang terhadap kebijakan dan prosedur yang ada
 - d. Melindungi asset cabang dari tindakan penyewengan
 - e. Menjamin seluruh bukti transaksi telah diarsip dengan aman

- f. Mengkoordinir tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - g. Mewakili BTN dalam acara resmi bila kacab berhalangan hadir
11. Pembukuan dan kontrol (*Bookeeping & Control*)
- a. Memastikan ketepatan data dan integritas laporan keuangan
 - b. Memastikan ketaatan atas kebijakan dan prosedur operasional cabang
 - c. Memastikan bahwa semua transaksi keuangan telah dicatat/dibukukan dengan benar
 - d. Memastikan kontrol intern telah dijalankan dengan baik dan benar
 - e. Memastikan bahwa semua fungsi rekonsiliasi telah dilakukan dengan baik dan benar
 - f. Memastikan bahwa pengarsipan bukti-bukti transaksi telah dilakukan dengan baik dan aman
 - g. Mengkoordinasi tindak lanjut pemeriksaan intern dan ekstern
12. Analisa dan pelaporan (*Financial Reporting*)
- a. Menyediakan dan menyampaikan laporan keuangan dan anggaran
 - b. Melakukan analisa laporan keuangan
 - c. Memastikan semua laporan keuangan telah dikirim kepada pihak-pihak yang terkait yang berkualitas dan tepat waktu
 - d. Memastikan bahwa semua seksi/unit telah melakukan tugas sesuai ketentuan
 - e. Memastikan proses dan operasional cabang berjalan dengan benar
 - f. Memelihara file pelaporan dengan baik dan aman
13. Kasi pembinaan dan penyelamatan kredit
- a. Membina dan memberikan pengarahan kepada LAS
 - b. Memonitor kondisi kredit dan mengidentifikasi kredit bermasalah
 - c. Mengajukan usulan kepada kacab tentang potensi kredit bermasalah
 - d. Mengkaji dan mengevaluasi rencana kerja dan target penerimaan angsuran
 - e. Memastikan pilihan penyelesaian kredit bermasalah yang baik
 - f. Memastikan ketaatan cabang terhadap kebijakan dan prosedur yang ada

- g. Mewakili BTN dalam acara resmi bila kacab berhalangan

14. Penyelamatan kredit

- a. Melakukan upaya penagihan sekaligus atas sisa kewajiban terhadap debitur bermasalah
- b. Mengusahakan penghapusan kredit yang dimungkinkan tidak dapat ditagih
- c. Melakukan kerjasama dengan BUPLN dan PN dalam rangka penyelamatan kredit
- d. Menerbitkan surat somasi kepada debitur bermasalah yang akan di serahkan BUPLN
- e. Mengusulkan restrukturisasi terhadap debitur bermasalah yang kooperatif

15. Pembinaan Debitur

- a. Memastikan proses pembinaan debitur sejak dini dilakukan setiap bulan
- b. Menyampaikan surat konfirmasi kepada debitur yang melakukan tunggakan satu bulan sudah dilaksanakan
- c. Melakukan kunjungan ke instansi dalam upaya pengkolektipan debitur
- d. Mengusulkan cara inovatif yang dapat memberikan rangsangan kepada debitur agar mengangsur dengan tertib dan lancar

2.4 Kegiatan Usaha Bank Tabungan Negara

Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 1968 dan surat Menteri Keuangan No.B 49/MK/IV/I/1974 kegiatan Bank Tabungan Negara dilaksanakan melalui berbagai macam bentuk tabungan dan memanfaatkan dana tersebut dengan memberikan pinjaman dalam bentuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Dalam melakukan kegiatan ini Bank Tabungan Negara telah membuka jaringan diseluruh wilayah Indonesia. Dengan jaringan pelayanan tersebut, kegiatan perbankan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh BTN antara lain:

1. Menerima simpanan masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, giro serta penerimaan obligasi;

2. Memberikan berbagai jenis kredit untuk KPR , kredit pemilikan asrama mahasiswa, kredit perbaikan rumah dan kredit konstruksi.
3. Menerima setoran pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), cukai tembakau dan setoran non pajak lainnya serta melaksanakan pembayaran gaji pegawai negeri.

2.5 Misi Bank Tabungan Negara

Misi Bank Tabungan Negara adalah menjadi Bank komersial yang sehat dan modern serta memperoleh keuntungan yang memadai untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mengutamakan usahanya dibidang pembiayaan perumahan rakyat dalam rangka menunjang pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

1. Melaksanakan kegiatan sebagai agen pembangunan dalam mensukseskan program pemerintah dibidang pembiayaan perumahan rakyat
2. Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan lainnya serta menyalurkan dalam bentuk kredit.

2.6 Tenaga Kerja

PT.Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Jember memiliki 36 orang pegawai yang terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak (*outsourcing*). Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut ini:

Tabel 1. Jabatan dan Jumlah Pegawai PT. BTN (Persero) Cab. Jember

Jabatan	Jumlah
Pegawai Tetap	
• Kepala Cabang	1
• Kepala Seksi	3
• Penyelia	2
• Pelaksana Staf Muda	1
• Pelaksana non Staf Muda	19
Pegawai Kontrak	
• Teller	1
• Satpam	2
• Pengemudi	4
• Pesuruh (<i>office boy</i>)	2
• Penjaga Malam	1
	36

Sumber data: PT.BTN (Persero) Cab.Jember

2.7 Jadwal Kerja

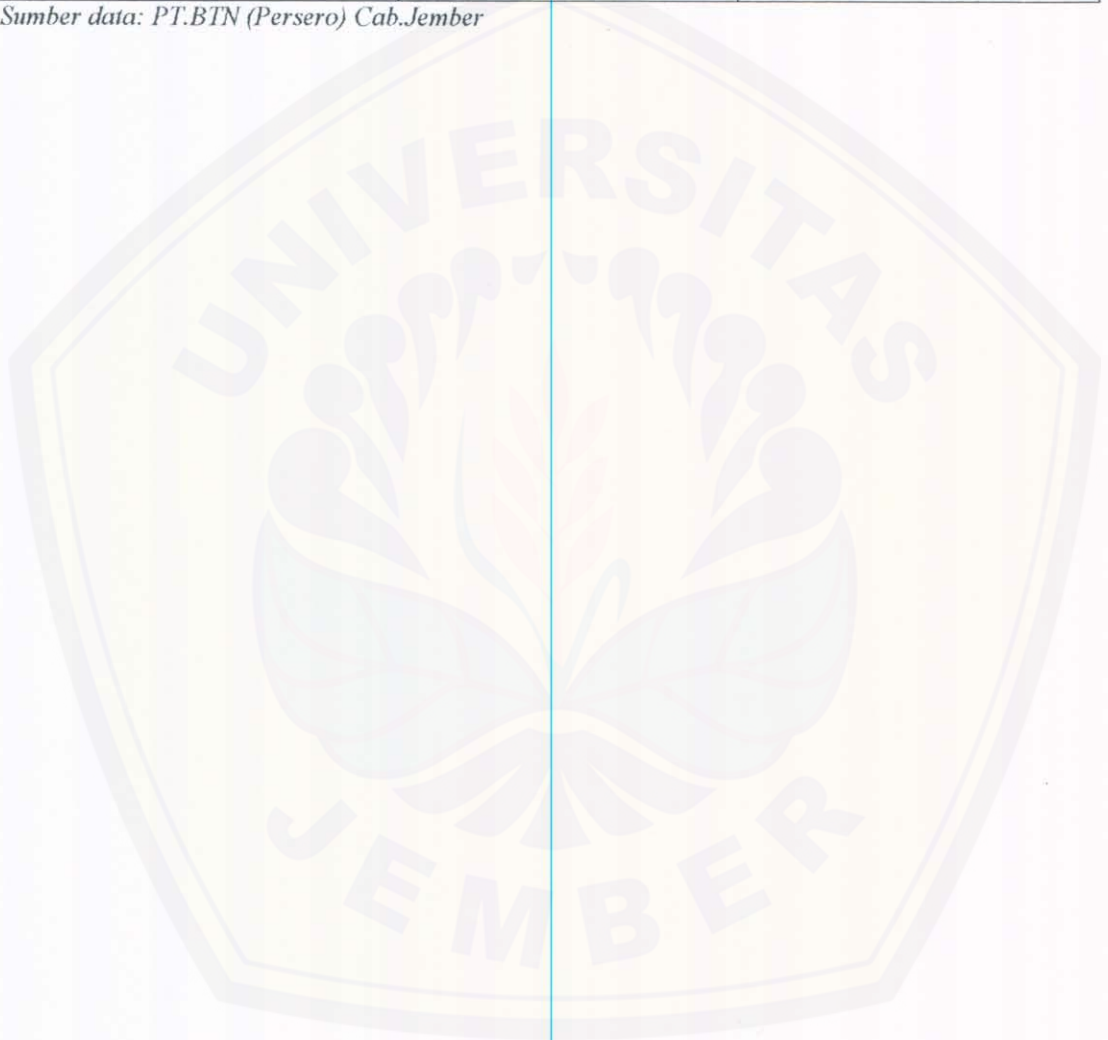
Untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan secara efektif dan efisien PT.Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Jember menerapkan 5 hari kerja, 9 jam sehari. Untuk penjaga malam mendapat jatah libur 1 hari dalam seminggu.

Jam kerja karyawan tersebut adalah sbb:

Tabel 2. Jadwal Kerja karyawan PT.BTN (Persero) Cab. Jember

Hari	Jam Kerja	Istirahat
Senin – Kamis	07.30 – 16.30	12.00 – 13.00
Jumat	07.30 – 16.30	11.30 – 13.00

Sumber data: PT.BTN (Persero) Cab.Jember



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Hasil Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata dari hasil yang telah diperoleh selama mengikuti Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yang berada di Jl. A. Yani No.5 Jember, tepatnya dibagian Administrasi Kredit (*Loan Administration*). Praktek Kerja Nyata dilakukan dengan cara bekerja secara langsung dan membantu kegiatan administrasi bank sebagaimana yang dilakukan oleh karyawan di bank tersebut. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan guna membandingkan dan memadukan antara teori yang penulis peroleh di bangku kuliah dengan praktek kerja di lingkungan perusahaan. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember merupakan Bank Umum Pemerintah yang dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.547/KMK.04/2000. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sangat berguna sekali bagi penulis sehubungan dengan pengumpulan data dan informasi sebagai pelengkap penyelesaian laporan akhir penulis dengan judul:

“Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember”.

Aktivitas yang dilakukan pada saat Praktek Kerja Nyata pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember disesuaikan dengan judul yang dipilih dalam penyusunan laporan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan membantu hal-hal yang lain.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama satu bulan penuh yaitu mulai tanggal 25 Februari 2002 s/d 25 Maret 2002. Dalam jangkah waktu satu bulan tersebut, sedikit banyak penulis telah memperoleh gambaran secara nyata mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan, khususnya tentang Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh PT. Bank Tabungan Negara.



Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) adalah sebagai berikut:

1. Pembekalan

Tahap awal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan tentang program Praktek Kerja Nyata guna mempermudah dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dan penyusunan laporan akhir mahasiswa.

2. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberikan kesempatan menentukan sendiri lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu pada kantor-kantor *non* Kantor Pelayanan Pajak antara lain BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, Koperasi dll).

3. Observasi

Setelah menentukan lokasi Praktek Kerja Nyata, maka dilakukan observasi langsung ke lokasi Praktek Kerja Nyata untuk memastikan apakah perusahaan tersebut memberikan kesempatan bagi para pemegang.

4. Pengajuan Proposal

Setelah perusahaan bersedia menyediakan tempat untuk magang, mahasiswa mengajukan proposal dan apabila proposal disetujui perusahaan memberikan memo sebagai persetujuan dan fakultas memberikan balasan dengan surat tugas.

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata disesuaikan dengan waktu jam kerja yang ditetapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember yaitu:

Senin s/d Jumat Jam 07.30 – 16.30, istirahat 12.00 – 13.00 sedangkan Sabtu libur

Dalam upaya pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara (*interview*) yaitu mengadakan komunikasi langsung dengan petugas di bagian umum (*general branch*) dan penulis juga melakukan observasi langsung pada bagian akuntansi dan pembukuan.

Tabel 3. Kegiatan Penulis selama mengikuti Praktek Kerja Nyata Pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember

Periode (1)	Kegiatan (2)
<p>Senin – Jum`at Tanggal: 25 Feb – 1 Maret 2002</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan PKN oleh Bpk. Munawar selaku Kepala Operasional mewakili Kacab dan sekaligus perkenalan dengan karyawan dan karyawati Bank Tabungan Negara • Entry data dokumen KPR ke Komputer • Membant bagian <i>Bookeeping & Control</i> mengumpulkan arsip penabung baru • Membuat SPM atas transaksi dengan rekanan
<p>Senin – Jumat Tanggal: 4 Maret- 8 Maret 2002</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mencari informasi tentang kegiatan perpajakan yang ada di Bank Tabungan Negara • Membantu bagian <i>Bookeeping & Control</i> membuat file kertas angsuran KPR • Menyiapkan arsip SSP dan faktur pajak rekanan • Bersama staf BTN melakukan penyeteroran pajak ke kantor pos dan giro • Memasukkan data register penarikan ATM batara pada bagian pembukuan
<p>Senin - Kamis Tanggal: 11 Maret- 14 Maret 2002</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat SPT masa PPN formulir 1101 PUT • Bersama staf BTN melakukan penagihan kepada nasabah KPR yang menunggak • Melakukan pelaporan pajak ke KPP • <i>Entry data dokumen KPR</i> • Membuat memo untuk pencairan dana notaris

(1)	(2)
Senin – Jum'at Tanggal: 18 Maret – 22 Maret 2002	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta penjelasan mengenai pemungutan PPN serta melengkapi data-data guna penyusunan laporan • Membuat file pengajuan KPR
Senin, 25 Maret 2002	<ul style="list-style-type: none"> • Penarikan peserta PKN oleh Dra. Sri Wahyuni, MBA selaku dosen pembimbing lapangan • Bersalaman dengan karyawan dan karyawan Bank Tabungan Negara

3.1.1 Konsep Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas pertambahan nilai suatu barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam negeri yang dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Secara umum, pajak dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Waluyo (1999:230), yang menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (didalam Daerah Pabean) baik Konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Dalam upaya mencapai keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan masyarakat yang berpenghasilan tinggi serta dalam upaya pengendalian pola konsumsi yang tidak produktif dari masyarakat, maka atas penyerahan atau atas impor barang-barang berwujud yang tergolong mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Juga dikenakan

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau jasa wajib dibuatkan Faktur Pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang dan atau jasa yang terutang pajak.

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. (Pasal 1 ayat 23 UU PPN 2000:197)

Barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. Sedangkan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN. (Mardiasmo, 2001:205-206)

3.1.2 Mekanisme pengenaan PPN berdasarkan UU PPN No. 18 Tahun 2000

a. Mekanisme Pengenaan PPN

- 1) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/ Jasa Kena Pajak (JKP) wajib memungut PPN dari pembeli/penerima BKP/ JKP yang bersangkutan, dengan membuat Faktur Pajak.
- 2) PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut merupakan Pajak Keluaran (*Out put Tax*) bagi PKP penjual BKP/ JKP, yang sifatnya sebagai pajak yang harus dibayar.
- 3) Pada waktu PKP diatas melakukan pembelian/perolehan BKP/JKP yang dikenakan PPN, PPN tersebut merupakan Pajak Masukan (*input tax*), yang sifatnya sebagai pajak yang dibayar dimuka, sepanjang BKP/JKP yang dibeli ada hubungannya dengan kegiatan usaha.
- 4) Untuk setiap masa pajak (setiap bulan), apabila Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan selisihnya harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

- 5) PKP wajib menyampaikan laporan Perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - a) barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
 - b) barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud.
 - c) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - d) penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan PKP yang bersangkutan.
- 2) Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh siapapun.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh PKP, syaratnya:
 - a) jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
 - b) penyerahan dilakukan didalan Daerah Pabean.
 - c) penyerahan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan PKP yang bersangkutan.
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain (Pasal 16C).
- 8) Penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan (*bukan inventory*) oleh PKP, sepanjang Pajak Masukan yang dibayar pada saat

perolehannya menurut ketentuan yang dapat dikreditkan (Pasal 16D UU PPN No.18 Tahun 2000).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku berdasarkan UU PPN No. 18 tahun 2000 adalah 10% (sepuluh persen). Sedang tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN, tetapi pajak masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan. Cara Menghitung PPN (Mardiasmo, 2001:218) adalah:

$$\text{PPN terutang} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Sedangkan untuk menghitung besarnya PPN yang kurang atau lebih di setor ke kas negara (Mardiasmo, 2001:218) adalah:

$$\text{PPN Kurang/lebih setor} = \text{Pajak keluaran} - \text{Pajak Masukan}$$

Secara umum PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP dipungut oleh PKP penjual. Dengan demikian pembeli BKP/JKP yang bersangkutan wajib membayar kepada PKP Penjual sebesar harga jual ditambah PPN yang terutang. Namun demikian, apabila yang bertindak sebagai pembeli BKP/JKP tersebut berstatus Pemungut PPN, PPN yang terutang atas transaksi penyerahan BKP/JKP tidak dipungut oleh PKP penjual, melainkan disetor langsung ke Kas Negara oleh Pemungut PPN tersebut atas nama PKP penjual. Dengan demikian, Pemungut PPN hanya membayar kepada Penjual sebesar harga jual, sedangkan PPN-nya disetor langsung ke kas negara.

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah Bendaharawan Pemerintah, Badan atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan BKP dan atau JKP kepada bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut(UU PPN No.18 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 27). Meskipun demikian, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai tetap berkewajiban untuk melaporkan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Atas kelebihan Pajak

Masukan dapat di ajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak, sepanjang Pajak Masukan tersebut berasal dari perolehan BKP/JKP dari BKP/JKP yang diserahkan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

c. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak di pungut oleh badan-badan tertentu dalam hal: (Gunadi, 2001:42-43)

- 1) Pembayaran yang jumlahnya tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (termasuk PPN & PPnBM) yang tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Dalam hal ini , PPN harus dipungut dan disetor oleh PKP yang bersangkutan.
- 2) Pembayaran untuk pembebasan tanah.
- 3) Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
- 4) Pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina.
- 5) Pembayaran atas rekening telepon.
- 6) Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
- 7) Pembayaran lainnya untuk penyerahan BKP/JKP yang menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- 8) Penyerahan BKP/JKP antar badan-badan tertentu. Dalam hal ini PPN dipungut dan disetor oleh pihak penjual.

3.1.3 Diskripsi Kegiatan Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember

Dengan adanya perjanjian kerjasama atau transaksi secara langsung tanpa adanya perjanjian kontrak yang dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dengan rekanan maka timbul kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh PT. Bank Tabungan Negara atas Pajak Pertambahan Nilai, dan sebagai wajib pungut harus memungut PPN atas setiap transaksi yang telah dilakukan berdasarkan:

- Keputusan Menteri Keuangan RI No.547/KMK.04/2000 tanggal 22 desember 2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu dan instansi pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN & PPnBM.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No.549/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Atas Mewah (PPN & PPnBM) oleh Badan-badan tertentu sebagai pemungut PPN.
- Undang-undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN & PPnBM, Pasal 1 ayat 27 dan pasal 16A ayat 2.

a. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Untuk pengadaan barang diawali dengan melihat stock barang yang ada di gudang oleh seksi operasional. Bila stock barang yang ada digudang sudah tidak ada dan barang tersebut diperlukan guna kegiatan operasional perusahaan, maka seksi operasional segera mencari rekanan dengan mengadakan seleksi terlebih dahulu. Yang menjadi bahan pertimbangan adalah BTN memilih rekanan yang menawarkan barang dengan kualitas baik. Apabila ada 2 rekanan yang menawarkan harga murah dengan barang yang berkualitas sama, maka seksi operasional memilih rekanan yang telah lama bekerja sama dengan BTN. Setelah seksi operasional mendapatkan rekanan. Seksi operasional akan menerima harga referensi dari rekanan sebagai informasi harga dasar. Seksi operasional mengajukan memo yang dilampiri harga referensi kepada kepala cabang. Apabila memo tersebut disetujui oleh kepala cabang, maka seksi operasional akan melakukan transaksi dengan rekanan. Pengadaan barang yang terjadi di PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember selama bulan februari yaitu adanya pembelian terhadap Alat Tulis Kantor (ATK). Pembelian tersebut dilakukan antara BTN dengan rekanan yang dalam hal ini rekanan adalah pedagang eceran. Dalam hal rekanan adalah pedagang eceran, pembeli langsung datang ke rekanan untuk melakukan pembelian barang secara spontan tanpa melakukan kontrak terlebih dahulu.

Untuk pengadaan jasa diawali dengan penandatanganan perjanjian kontrak antara PT.BTN (Persero) Cabang Jember dengan rekanan. Berdasarkan perjanjian kontrak tersebut rekanan melakukan tugasnya. Dalam hal ini rekanan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemanfaatan jasa yang dikenakan pajak dalam negeri selama bulan februari antara lain: *service charge* (pemeliharaan gedung), *Jasa fee* dan *supervisi managemen*, jasa pengiriman naskah/laporan dan paket BTN, *repair body* dan *all body paint* serta tenaga ahli notaris.

Berikut ini jenis barang dan jasa yang terutang PPN selama bulan Februari yang pelaporannya Maret 2002:

Tabel 4. Transaksi yang menimbulkan PPN masukan februari 2002 yang pelaporannya maret 2002

No.	Nama barang/Jasa	Nama Rekanan	DPP (Rp)	PPN 10%
1.	Service charge	PT.Binayasa	5.211.538	521.154
2.	Jasa fee, supervisi Managemen	PT.Binayasa	949.500	94.950
3.	Pengiriman naskah /laporan & paket	PT.Kertagaya	91.350	9.135
4.	ATK	CV. Asia Cmlg	4.476.800	447.680
5.	Repair body	PT. Astra Tbk.	6.873.636	687.364
6.	Biaya notaris	Fatturahman,SH	1.818,191	181.819
7.	Biaya notaris	Daniel, SH	3.272.727	327.273
8.	Biaya notaris	Haryo W, SH	4.431.818	443.181
9.	Biaya notaris	Dongan PS, SH	6.500.000	650.000
Jumlah			33.625.566	3.362576

Sumber data: PT. BTN (Persero) Cab. Jember

b. Proses Pengenaan PPN Wajib Pungut

Setelah seksi operasional melakukan transaksi dengan rekanan, seksi operasional akan menerima berkas-berkas pembelian yaitu kuitansi, nota pembelian, SSP atas nama rekanan dan faktur pajak standar PPN Masukan (apabila rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP). Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, karena berdasarkan keputusan KMK 549/KMK.04/2000 tentang tata cara pemungutan, penyetoran, pelaporan PPN & PPnBM oleh badan-badan tertentu sebagai pemungut PPN, setiap terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, rekanan wajib membuat Faktur Pajak. Faktur pajak yang dibuat oleh rekanan adalah faktur pajak standar yang paling sedikit memuat nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan BKP/JKP, jenis dan kuantum, jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk pajak atau besarnya pajak dicantumkan secara terpisah, tanggal pembuatan faktur, dan dibuat rangkap tiga, lembar ke-1 untuk penerima BKP/JKP dan lembar ke-2 untuk arsip PKP yang bersangkutan, lembar ke-3 untuk KPP melalui Pemungut PPN. Pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhi cap “Disetor Tanggal:

” dan ditandatangani oleh pemungut PPN yang bersangkutan. Pada pembelian alat tulis kantor, seksi operasional tidak menerima berkas faktur pajak standar PPN Masukan melainkan hanya nota pembelian, kuitansi dan SSP atas nama rekanan karena rekanan merupakan pedagang eceran yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Setelah seksi operasional menerima berkas tagihan transaksi dari rekanan, dibuatlah Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan ke kepala cabang guna mendapatkan fiatur (persetujuan). Dalam SPM tersebut disebutkan harga jual/kontrak, PPN yang dipungut dan jumlah yang dibayarkan Pembayaran oleh PT. Bank Tabungan Negara kepada rekanan secara giral melalui rekening yang mereka miliki di BTN (contoh terlampir). SPM yang telah disetujui beserta berkas-berkasnya diserahkan ke seksi akuntansi. Hasil pungutan PPN tersebut dimasukkan ke kas BTN dan nantinya diminta kembali untuk disetor ke kas negara.

- 1B. Apabila stock sudah habis sie operasional membuat rencana anggaran pembelian barang
- 2A. Rencana anggaran diajukan dalam bentuk memo ke kacab
- 2B. Apabila memo disetujui seksi operasional membuat SPM dan ditandatangani Kacab
- 3AB. Seksi operasional melakukan transaksi dengan rekanan
- 4A. Seksi operasional memberikan berkas pembelian ke seksi akuntansi
- 4B. Seksi operasional meminta kembali sejumlah uang yang ada di faktur pajak untuk disetorkan ke kas negara (yang telah disetor ke kas BTN oleh seksi operasional)
5. Seksi operasional melakukan pembayaran ke kantor pos
6. Seksi operasional melaporkan ke KPP Jember dan menerima SSP lembar 1 untuk diberikan kembali kepada rekanan sebagai bukti bahwa PPN yang telah dipungut telah disetor ke kas negara, & SSP lembar 5 untuk arsip wajib pungut

c. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Pemungut PPN & PPnBM menurut UU PPN tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- 1) Dirjen Anggaran
- 2) Bendaharawan Pemerintah
- 3) Pertamina
- 4) Kontraktor bagi hasil dan kontrak karya dibidang minyak dan gas bumi
- 5) **BUMN**, BUMD dan Badan Usaha Milik Daerah
- 6) Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah

PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember adalah salah satu dari beberapa lembaga negara yang ditunjuk sebagai pemungut PPN dan PPnBM.

Karena PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember adalah **BUMN** maka secara otomatis sebagai pemungut PPN atau wajib pajak wajib pungut (WAPU)

d. Contoh Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

- 1) Pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2002 BTN mengadakan pembelian Alat tulis kantor pada CV. Asia cemerlang sbb:

Tabel 5. Pembelian Alat Tulis Kantor
Bulan Februari 2002

Banyaknya	Nama barang	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
4 box	Cont. form 1 ply SD	11.700	462.800
4 box	Cont. form 2 ply SD	175.000	700.000
1 buah	Toner HP 98 A	1.275.000	1.275.000
10 roll	Kertas Fax 210x30	22.750	227.500
10 buah	Buku folio 100	11.000	110.000
1 buah	Kalkulator casio	140.000	140.000
2 box	Disket fuji	50.000	100.000
10 buah	Catridge P.130	87.500	875.000
20 buah	Pita Epson IQ 1170	10.400	208.000
10 buah	Buku mirage	6.500	65.000
14 buah	Baterai ABC alkalin	3.500	49.000
1 buah	Ribon catridge	125.000	125.000
1 buah	Ribon catridge 7754	40.000	40.000
12 rim	CD folio wisnu	13.500	27.000
4 buah	Lem	14.500	72.500
-	-	-	-
Total			4.476.800

PT. Bank Tabungan Negara membayar sejumlah harga pengadaan barang sebesar Rp. 4.476.800, maka perhitungan PPN-nya adalah:

Jumlah harga jual	: Rp. 4.476.800
PPN 10% x Rp. 4.476.800	: Rp. 447.700

Harga yang harus dibayar oleh BTN kepada CV.Asia cemerlang adalah sebesar Rp. 4.029.100, Sedang yang harus dipungut oleh BTN adalah sebesar Rp. 447.700

- 2) PT. Bank Tabungan Negara (persero) Cab. Jember melakukan kontrak dengan PT. Binayasa PB aatas Service Charge (pemeliharaan gedung) dengan harga kontrak Rp. 13.028.846

maka perhitungannya adalah:

Harga kontrak	: Rp. 13.028.846
DPP 40% X Rp.13.028.846	: Rp. 5.211.538
PPN 10% X Rp. 5.211.538	: Rp. 521.154

Harga yang dibayar oleh BTN sebesar Rp. 12.507.692

Sedangkan PPN yang harus dipungut dan di setor ke kas negara oleh BTN sebesar Rp. 521.154

- 3) Atas pembuatan akta tanah BTN membayar sejumlah tagihan sebesar Rp.750.000 (termasuk PPN) kepada notaris fatturahman.

Perhitungan PPN-nya adalah:

Jumlah Tagihan	: Rp. 750.000
DPP 100/110 X Rp. 750.000	: Rp. 681.818
PPN 10% X Rp. 681.818	: Rp. 68.182
PPh	: Rp. 40.909
<i>Jumlah yang dibayarkan</i>	<u>: Rp. 640.000</u>

e. Administrasi Pajak Pertambahan Nilai

Secara umum administrasi yang dilaksanakan oleh PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember tidak mengalami kesulitan yang berarti, hal tersebut dikarenakan antara lain perusahaan selalu mengirim karyawannya untuk mengikuti penyuluhan perpajakan yang diselenggarakan oleh KPP.

1) Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Proses pembayaran PPN diawali dengan diterimanya Faktur pajak dari rekanan oleh bagian Operasional dalam masa pajak tertentu. Setelah menerima berkas

tersebut sie operasional membuat SSP (apabila rekanan tidak melampirkan) dengan membubuhkan NPWP serta identitas rekanan yang bersangkutan tetapi penanda tangan SSP dilakukan oleh BTN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut.

Dalam pembuatan SSP, dibuat rangkap 5 yang mana diperuntukkan sbb:

Lembar ke-1 : Arsip rekanan/PKP

Lembar ke-2 : Arsip KPP melalui KPKN

Lembar ke-3 : PKP rekanan dilaporkan dalam SPT masa PPN Rekanan

Lembar ke-4 : Arsip Kantor Pos untuk pemberitahuan ke KPP

Lembar ke-5 : Arsip BTN sebagai pemungut PPN

Setelah SSP selesai dibuat seksi operasional maka selanjutnya membuat Surat Perintah Membayar (SPM), sejumlah nilai yang tertera dalam kuitansi atau faktur pajak standar dan diajukan ke seksi akuntansi. Setelah itu seksi operasional melakukan pembayaran pajak pada awal bulan sebelum tanggal 10 sejumlah yang tercantum dalam beberapa faktur pajak ke kantor pos.

2) *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai*

Setelah melakukan pembayaran ke kantor pos dan menerima bukti penerimaan pembayaran dalam bentuk SSP lembar 1,3,5 yang telah diberi tanda cap oleh kantor pos (yang berarti telah dibayarkan melalui kantor pos yang bersangkutan) seksi operasional berkewajiban membuat laporan pemungutan ke KPP dengan menggunakan formulir 1101 PUT yaitu paling lambat hari ke-20 setelah bulan terjadinya pembayaran atas tagihan. Adapun isi laporan tersebut adalah lampiran pungutan oleh badan tertentu yaitu PPN yang dipungut bulan ini, dan jumlah PPN yang dipungut sampai dengan bulan lalu, supaya diketahui selalu jumlah kumulatif PPN yang dipungut setiap bulannya, yang dilampiri dengan Faktur pajak standar dari rekanan dan SSP lembar ke tiga.

Dalam Pasal 3 UU No.16 tahun 2000 tentang KUP digariskan bahwa bagi PKP, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN yang seharusnya terutang

dan untuk melaporkan tentang pajak yang dipotong atau dipungutnya dan disetorkannya.

3) *Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai*

Pada saat terjadinya transaksi dengan rekanan, seksi operasional menerima berkas-berkas berupa faktur pajak standar, kuitansi, SSP atas nama rekanan, berkas tersebut lalu diserahkan ke seksi Akuntansi.

Apabila dalam pembelian barang tersebut terutang PPN dan PPN tersebut dapat dikreditkan maka jurnal yang dibuat oleh seksi akuntansi adalah sbb:

Pembelian barang	Rp. xxx	
PPN Masukan	Rp. xxx	
Kas		Rp. xxx

Apabila dalam pembelian barang tersebut terutang PPN dan PPN tersebut tidak dapat dikreditkan maka jurnal yang dibuat:

Pembelian barang	Rp. xxx	
PPN Masukan	Rp. xxx	
Kas		Rp. xxx

Tetapi pada akhir bulan PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan dilakukan penyesuaian dengan cara membebankan PPN masukan tsb pada perkiraan barang yang dibeli dengan jurnal sbb:

Pembelian barang	Rp. xxx	
PPN Masukan		Rp. xxx

Dalam SPM yang diminta seksi operasional adalah sejumlah pembelian/transaksi yang inklusif dengan PPN, oleh sebab itu seksi operasional membayar kembali ke kas BTN sejumlah PPN atas pembelian tersebut, karena BTN adalah pemungut PPN, jurnal yang dibuat adalah sbb:

Kas	Rp. xxx	
	Pembelian barang	Rp. xxx

Karena uang yang dimasukkan ke kas BTN akan diminta kembali oleh seksi operasional atas dasar faktur pajak standar . Setelah itu seksi operasional mengajukan ke seksi akuntansi dan setelah disetujui, seksi operasional membuat SSP dan disetor ke kantor pos, pada waktu seksi operasional melakukan pembayaran, seksi akuntansi menjurnal:

PPN Masukan	Rp. xxx	
	Kas	Rp. xxx

3.2 Penilaian Terhadap Kewajiban Perpajakan

Kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember sebagai wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai yaitu:

- Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai
- Menyetorkan pajak terutang
- Melaporkan Surat Pemberitahuan Masa bagi Pemungut PPN

Untuk kewajiban yang pertama yaitu dalam hal pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember telah melakukan pemungutan PPN atas setiap transaksi yang dilakukan dengan rekanan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya arsip SSP lembar ke-5 dan faktur pajak lembar ke-1.

Untuk kewajiban menyetor pajak yang terutang sudah dilakukan dengan baik dan tidak pernah terlambat dan belum pernah PT.Bank Tabungan Negara (Persero) diperiksa kewajiban perpajakannya. Dalam melakukan penyetoran selalu sebelum tanggal 8 bulan berikutnya walaupun Undang-undang memberikan batas waktu sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya atau pada hari kesepuluh setelah bulan dilakukannya pembayaran atas tagihan.

Untuk kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pemungut PPN form.1101 PUT PT.BTN (Persero) Cabang Jember telah dilakukan dengan baik karena PT.Bank Tabungan Negara selalu menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN sebelum batas akhir penyampaian SPT Masa PPN yaitu 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran meskipun Undang-undang memberikan batas waktu 20 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan rekanan.



IV. PENUTUP

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan atas terselesainya penyusunan laporan akhir Praktek Kerja Nyata. Demikian laporan tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember dapat terselesaikan. Penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan dorongan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata ini dengan baik.

Khususnya karyawan PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember bagian Operasional dan administrasi kredit, penyusun mengucapkan terima kasih karena telah membantu dan memberikan dorongan baik moril maupun materiil dalam penyusunan laporan ini.

Penyusun juga memohon maaf apabila ada kesalahan atau hal yang tidak berkenan baik selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata maupun pada saat penyusunan laporan ini. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat dan berguna dalam proses pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama bagi Studi Ilmu Perpajakan pada khususnya dan bagi khalayak ilmu pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, 2001, *Paduan Komprehensif*, PT. Multi Consultindo; Jakarta
- Gilarso, 1991, *Pengantar Ilmu ekonomi*, Kanisus; Yogyakarta
- Judisseno, Rimsky, 1997, *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta
- Mardiasmo, 2001, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi; Yogyakarta
- Munawir, 1999, *Perpajakan*, Liberty; Yogyakarta
- Swasta Basu, 1990, *Asas-asas Manajemen Modern*, Liberty; Jakarta
- Waluyo, wirawan, 1999, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat; Jakarta
- Widyaprakosa, S, dkk, 1998, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Badan Pembinaan Universitas Jember
- Menteri Keuangan RI, 2000, *KMK No.547 KMK.04 2000*; Jakarta
- Menteri Keuangan RI, 2000, *KMK No.549 KMK.04 2000*; Jakarta
- _____, 2000, *Undang-undang Perpajakan*, Citra Umbara; Bandung



SURAT - TUGAS

No. : 558 /125.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

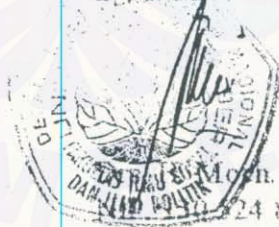
No	Nama	NIM
1.	Emi Prasetyawati	99- 1016
2.	Emi Supriyantina	99- 1018
3.	Siti Choiriyah	99- 1040
4.	Agus Widhianto	99- 1104

untuk mengikuti program kegiatan magang pada Bank Tabungan Negara
Jember, selama 30 hari terhitung sejak tanggal 25 Februari 2002 s/d
tanggal 25 Maret 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan
magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 24 Februari 2002

Dekan



Moch. Toerki
24 832









































Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

NPWP : 1. 001. 609. 5 - G26

ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA
Bulan Februari-Maret 2002

Nama : Agus Widhianto
NIM : 990903101104
Jurusan : Perpajakan

No	Hari	Tanggal	Tanda tangan	
			Hadir	Pulang
1.	Senin	25 Pebruari 2002		
2.	Selasa	26 Pebruari 2002		
3.	Rabu	27 Pebruari 2002		
4.	Kamis	28 Pebruari 2002		
5.	Jum'at	1 Maret 2002		
6.	Senin	4 Maret 2002		
7.	Selasa	5 Maret 2002		
8.	Rabu	6 Maret 2002		
9.	Kamis	7 Maret 2002		
10.	Jum'at	8 Maret 2002		
11.	Senin	11 Maret 2002		
12.	Selasa	12 Maret 2002		
13.	Rabu	13 Maret 2002		
14.	Kamis	14 Maret 2002		
15.	Jum'at	15 Maret 2002	LIBUR	LIBUR
16.	Senin	18 Maret 2002		
17.	Selasa	19 Maret 2002		
18.	Rabu	20 Maret 2002		
19.	Kamis	21 Maret 2002		
20.	Jum'at	22 Maret 2002		
21.	Senin	25 Maret 2002		

Pembimbing Lapangan


(EKO Kuswantoro)
NIK. 5523

Mengetahui,
Kepala Sie Operasional



(MUNAWAR)
NIK. 1570

• KANTOR CABANG JEMBER

Jl. A. Yani No: 05 Jember 68118
Telp. (0331) 484616, 484611, 489266, 489292
Facs. (0331) 484617 Telex : 431587



DAFTAR KEGIATAN KONSULTASI/ BIMBINGAN LAPORAN AKHIR
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN / ~~PERPAJAKAN~~ MANAJEMEN

Nama Mahasiswa : AGUS WIDHIANTO
 Nomor Induk Mahasiswa : 990903101104
 Alamat Mahasiswa : Jl.Arlan No.120 Pasirian Lumajang
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Judul Laporan Akbir :
 PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI WAJIB PUNGUT
 PADA PT.BANK TABUNGANNNEGARA (PERSERO) CABANG JEMBER

Dosen Pembimbing : Drs. Sutrisno, M.Si
 (Pengganti Bondan Catur K, SE)

No	Hari/Tanggal	Jam	Uraian Kegiatan	Ttd.Pemb/Ass.
1	Senin/10.06.02	10.00	BAB. I & II	
2	Kamis/13.06.02	09.00	BAB. III & IV	
3	Senin/18.06.02	10.00	Keseluruhan BAB. I,II, III, IV dan Lampiran	

Catatan : 1. Dibawa mahasiswa yang bersangkutan pada setiap konsultasi
 2. Ditanda tangani oleh Dosen Pembimbing Laporan Akhir

Kepada Yth :
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jember
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 1
Di
Jember

LAPORAN PEMUNGUTAN PPN / PPN.BM
BULAN : FEBRUARI 2002

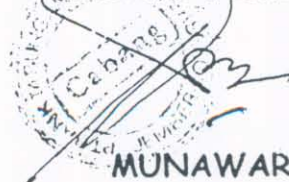
NO.	URAIAN	JUMLAH FAKTUR (TERLAMPIR)	PPN / PPNBM YANG DIPUNGUT	
			PPN	PPnBM
1	Bulan ini	3 lembar	3.362.576	-
2	s/d Bulan Lalu	208 lembar	30.748.164	-
	s/d Bulan Ini	211 lembar	34.110.740	-

NPWP : 1.001.609.-626

Jember, 10 Maret 2002

BANK BTN

CABANG JEMBER



MUNAWAR

Nip. 1570



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :
Faksimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
Nama :
Alamat :
Jenis Pajak :
N.P.W.P :
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak :

[Signature]
Petugas penerima
NIP



SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1101 PUT

Masa Pajak Februari 2002
 Pembetulan Masa Pajak 20 ke- ()

PERHATIAN : BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA BAGI PEMUNGUT PPN
 DIISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK
 DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK
 BERTANDA X DALAM YANG SESUAI
 ANOKA DALAM RUPIAH PENUH

A IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. N.P.W.P. 01 001 609 5 626 001
 2. Nama Pemungut Bank BTN Cabang Jember
 3. Alamat Jl. A Yani No.5 Jember
 4. Nomor Telepon (0331) 484611 Nomor Faksimila (0331) 484617
 5. Kegiatan Usaha Perbankan

Perubahan Identitas :
 Nama Baru
 Alamat Baru
 Nomor Telepon Baru

B PEMBAYARAN ATAS PEROLEHAN BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)

KODE KOLOM	PEMBAIULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	
		Bulan ini	sd Bulan ini
1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)			
B.1.1		34.577.824	78.796.482
B.1.2		-	-
B.1.3		34.577.824	78.796.482
2 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)			
B.2.1		-	-
B.2.2		-	-
B.2.3		-	-

C PAJAK YANG HARUS DIPUNGUT DAN DISETOR

1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)			
C.1.1		3.362.576	
C.1.2		-	
C.1.3		3.362.576	
2 Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM)			
C.2.1		-	
C.2.2		-	
C.2.3		-	

D. LAMPIRAN

1. FORMULIR 1101 PUT 1
 2. FORMULIR 1101 PUT 2
 3. SURAT KUASA KHUSUS TERSEBUT PADA E.2
 4. FOTOKOPI SSP LEMBAR KE-5 TERSEBUT PADA C.1.3 DAN C.2.3

SEHANYAK 9 LEMBAR Rp 3.362.576

LAMPIRAN - I

DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR
 MELALUI KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA ATAU
 KAS DAERAH/BANK PEMBANGUNAN DAERAH SELAKU KAS DAERAH

FORMULIR
 1101 PUT 1

Masa Pajak Februari 2002
 Pembetulan Masa Pajak 20 ke

NPWP: 0110116095526010

F A K T O R P A J A K

Nama & N.P.W.P Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Sen	Tgl Dasar Pengenaan PPN	Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	Dasar Pengenaan PPN BM (Rp)	PPn BM (Rp)	Keterangan
(2) NIHIL	(3) NIHIL	(4) NIHIL	(5) NIHIL	(6) NIHIL	(7) NIHIL	(8) NIHIL	(9) NIHIL	(10) NIHIL
J U M L A H								

J U M L A H

1. Isikan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.2-Formulir-SPT-Masa Induk (Formulir 1101-PUT),
 dan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.2 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101-PUT).

LAMPIRAN - II
DAFTAR PPN DAN PPN BM YANG DIPUNGUT DAN DISELOR SENDIRI

FORMULIR
1101 PUT 2

Masa Pajak Februari 2002
 Pemcutian Masa Pajak 2002 ke-

5 - 5 2 6 1 0 0

NPWP 21-201-509

F A K T U R P A J A K

Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan	Nomor Sen	Tgl.	FAKTUR PAJAK		TANGGAL SSP		Keterangan
				Dasar Pengenaan PPN (Rp)	PPN (Rp)	PPN	PPn BM (Rp)	
1. Binayasa PB 573.019.5-025.000	01.02.02	DLMYT-025-0000127		5.215.538	521.154	07.02	-	
2. Binayasa PB 573.019.5-025.000	14.02.02	DLMYT-025-177		349.500	34.950	07.02	-	
3. Kertagaya 308.538.6-626	28.02.02	0WLSK-626-0001058		31.350	3.135	07.02	-	
4. Asia Cemerlang 613.118.7-626	14.02.02	-		4.476.800	447.700	07.02	-	Kwansi
5. Toyota Auto 2000 1.302.584.6-626.001	28.02.02	-		6.973.636	687.464	07.02	-	Kwansi
J U M L A H								

Isikan jumlah pada angka (7) ke kolom C.1.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);
Isikan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101-PUT)



TEMEN KEUANGAN RI
 DIRAJAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
 DAFTAR PPN-DAN PPh BM YANG DIPUNGUT DAN DISETOR SENDIRI

FORMULIR
 1101 PUT 2

Masa Pajak Februari 2002
 Pembetulan Masa Pajak 2002

PEMUNGUT : Bank BTN Cabang Jember

N.P.W.P. 01 301 603 5 626 00

Nama & N.P.W.P. Rekanan	Tanggal Pembayaran Tagihan (3)	Nomor Sen (4)	Tgl. (5)	FAKTUR PAJAK				Tanggal SSP		Keterangan
				Dasar Pengenaan PPN (Rp) (6)	PPN (Rp) (7)	Dasar Pengenaan PPh BM (Rp) (8)	PPh BM (Rp) (9)	PPN (10)	PPh BM (11)	
Shahrumahman .634.671.9-626	08.02.02	-	-	2.000.000	181.819	-	-	07.02	-	Kwitansi
aniel C Iskandar .464.369.5-626	21.02.02	-	-	3.600.000	327.273	-	-	07.02	-	Kwitansi
aryo Wirasmo .055.657.6-627	27.02.02	-	-	4.875.000	443.181	-	-	07.02	-	Kwitansi
onggan P Sinaga	28.02.02	-	-	5.500.000	550.000	-	-	07.02	-	Kwitansi
J U M L A H				34.577.824	3.362.576					

Isi jumlah pada angka (7) ke-kolom C.1.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT);
 Isikan jumlah pada angka (9) ke kolom C.2.3 Formulir SPT Masa Induk (Formulir 1101 PUT)

FAKTUR PAJAK STANDAR

dan Nomor Seri Faktur Pajak : **DLMYT - 025 - 0000127**

usaha Kena Pajak
 : PT. Binayasa Putra Batara
 : Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130
 :

0	1
---	---

 .

5	7	3
---	---	---

 .

0	1	9
---	---	---

 .

5

 .

0	2	5
---	---	---

 .

0	0	0
---	---	---

 : Tanggal Pengukuhan PKP : 14 Februari 1992

Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak
 : PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Jember
 : Jl. Jend A Yani No. 5 Jember 68118
 :

1

 .

0	0	1
---	---	---

 .

6	0	9
---	---	---

 .

5

 .

6	2	6
---	---	---

Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn (Rp.)
Service Charge Periode : Februari '2002	13,028,848
Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	13,028,848
Potong Harga	
Uang Muka yang telah diterima	
Pengenaan Pajak 40% X Rp. 13,028,848	5,211,538
= 10 % x Dasar Pengenaan Pajak	521,154

Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.

Jakarta, 01 Februari 2002

[Signature]
H. Gafol Suratmono, SH
 Direktur





PWP : 01 573 019 5 025 006

sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : PT. Binayasa Putra Batara

ALAMAT : MENARA BTN NO.1 JAKARTA 101310

AP/Kode Jenis Pajak : 0131
Kode Jenis Setoran : 100

Uraian Pembayaran : Service Charge Periode :
Februari 2002

Masa Pajak :
Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

Tahun :
Tisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :
sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : 521.154
dalam rupiah penuh

Terbilang : lima ratus dua puluh satu ribu
seratus lima puluh empat rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal :
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor :
Jember, tgl. 07 Maret 2002
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :
SITI FARIDA S

Nama Jelas :
ABDUL KHALIK
Peny. Akunt. & Pelaporan

Tempat Validasi Kantor Penerima Pembayaran



FAKTUR PAJAK STANDAR

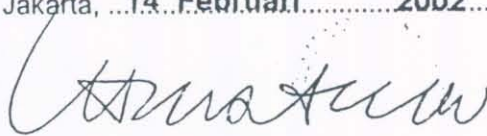
dan Nomor Seri Faktur Pajak :	DLMYT-025-177
Usaha Kena Pajak	
: PT. Binayasa Putra Batara	
: Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130	
: 01 . 573 . 019 . 5 . 025 . 000	
: Tanggal Pengukuhan PKP : 14 Februari 1992	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak	
: PT. Bank Tabungan Negara Cabang Jember	
: Jl. A. Yani No. 5 Jember 68118	
: 0 1 . 0 0 1 . 6 0 9 . 5 . 6 2 6	

Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn (Rp.)
Jasa Fee & Supervisi Management tenaga outsourcing bulan Februari 2002	949,500
Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)	
	949,500
Potongan Harga	
Uang Muka yang telah diterima	
	949,500
Dasar Pengenaan Pajak	
	94,950
= 10 % x Dasar Pengenaan Pajak	

Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
..... %	Rp.	Rp.
Jumlah		Rp.

Jakarta, ...14. Februari.....2002.....

H. Gatot Suratmono, SH.
 Direktur



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

Untuk Arsitek Pindah Tahun 2002

NPWP : 01.573.019.5-025.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. BINAYASA PUTRA BATARA

ALAMAT : MENARA BTN LT. 12, JL. GAJAH MADA NO. 1
JAKARTA 10130

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
0131	100	PPN (Jasa fee dan Supervisi Manajemen)
		Tenaga Outsourcing bulan Februari 2002
		Bank BTN Cabang Jember

Masa Pajak												Tahun
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2002
	XX											<i>Diisi tahun terdangus pajak</i>

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / / / / / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp. 94,950	Sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor
Jember, tgl. 07 Maret 2002
Cap dan tanda tangan
ABDUL KHAERIK
Nama Jelas Peny, Akunt, & Pelaporan

Ruang Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran
SITI FARIDA S
NIP. 96393972

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)
CABANG Jember

SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 1 1 9 4 7 1 1

Tanggal 2 8 0 2 0 2

Lampiran

Dengan huruf

913.500

=sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus
=rupiah=

Untuk Pembayaran :	Pengiriman naskah/laporan dan Paket bulan february 2002 dengan rincian sbb:	
	Biaya Pengiriman	Rp. 913.500
	Dpp	Rp. 91.350
	PPN	Rp. 9.135
	Jumlah yang dibayar	Rp. 904.365

Nomor Perkiraan :
9.23.00
Paraf

Catatan Kasir :

Diterima oleh
Tgl. 28.02.02

Setuju bayar :

Orisator :

Pembayaran :

tunai

giral Tab. 030.J.25256.K



No. Faktur Penjualan / Kontrak / Order. *) **FAKTUR PAJAK STANDAR**

Nomor Seri : CWLSK-626 No. 0001058

PENGUSAHA KENA PAJAK

Nama : PT. KERTA GAYA PUSAKA.
 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma 11 (Gd. PJKA) Jember.

N. P. W. P. : 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6

No. Pengukuhan PKP. : 626.01531.08.95.

Tanggal : 11.08.95.

Tanggal Penyerahan Pembayaran *) :

PEMBELI BKP / PENERIMA JKP :

Nama : PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)
 Alamat : CABANG JEMBER

N. P. W. P. : 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6

No. urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga satuan (Rp.)	Harga Jual / Penggantian / Uang muka / Termijn (Rp.)
1	Biaya Pengiriman Naskah / Laporan dan Paket. Untuk Bulan Februari 2002			Rp. 913.500,-

Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn *)	Rp. 913.500,-
Dikurangi potongan harga	
Dikurangi uang muka yang telah diterima	
Dasar pengenaan Pajak = 10% x Rp. 913.500,-	" 91.350,-
PPN = 10% x Dasar pengenaan Pajak	" 9.135,-

TARIF	DPP	PPn BM
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
%	Rp.	Rp.
TOTAL		Rp.

Jember, 28-Februari-2002

 Sy. Kii.-
 Kepala Perwakilan

*) Coret yang tidak perlu.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
JEMBER

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR **5**

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

PWP : 1 . 3 9 8 . 5 3 8 . 6 - 6 2 6 . [] [] []
 sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP : PT. KERTA GAYA PUSAKA
ALAMAT : JL. WIJAYA KUSUMA NO. 15 (GD.PT.KAI) JEMBER

AP/Kode Jenis Pajak **Kode Jenis Setoran** **Uraian Pembayaran**
 0 1 2 1 [] [] [] PPN DN - Biaya Pengiriman Naskah/Laporan
 dan Paket. PT. BANK TABUNGAN NEGARA
 (PERSERO) CABANG JEMBER

Masa Pajak **Tahun**
 an Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 2 0 0 2
 Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] [] / [] [] [] []
 sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran **Terbilang** : Sembilanribu seratus tigapuluhlima -
 sesuai dengan rupiah penuh rupiah.--
 Rp. 9.135,- **REKORDAN BUKUAN**

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
 Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor 07 MAR 2002
 Jember....., tgl
 Cap dan tanda tangan
 Nama Jelas :
 ABDUL KHALIK
 Peny. Akunt. & Pajak

Nama Jelas :
Ruang Validasi Kantor Penerima 90310730

Nama Jelas :
 (Circular stamp)

sesuai buku petunjuk pengisian

No. _____

elah terima dari

BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) JEMBER

ang sejumlah

~~Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah~~

ntuk pembayaran

Pembelian Alat Tulis Kantor dan Supplies Computer untuk

bulan Februari 2002 sesuai dengan nota terlampir.

Jember, 14 Februari 2002

Rp.

4.476.800,-



ASIA CEMERLANG

Jl. Kalimantan 80A
Telp. (0331) 321579 332404
332404 JEMBER
YAYUK INDRAMATI

ASIA Stationery

Jl. Kalimantan 80A Jember

☎ (0331) 321579 - 332404 (Fax) (0331) 332404

Hp. 081 130 1993 Hp. 081 235 23456

TGL 14 Februari 2002

KEPADA YTH.
BANK TABUNGAN NEGARA
JEMBER

OTA No. _____

Banyaknya	NAMA BARANG	Harga Satuan	JUMLAH
1 Box	Cont. Form 1 P14 K 50	115.000	115.000
1 Box	Cont. Form 2 P14 K 50	175.000	175.000
1 Box	Toner HP 98 A	1.275.000	1.275.000
1 Roll	Kertas Fax 210 x 30	227.500	227.500
10 Bk.	Bk. Folio 100	110.000	1.100.000
1 Bk.	Kalkulator Casio DF-120 TB-W	110.000	110.000
1 Bk.	Disket Fuji	50.000	50.000
1 Bk.	Cartridge P130	675.000	675.000
1 Bk.	Pita Epson LQ 1170	10.000	10.000
1 Bk.	Bk. Expedisi 100 Mirage	165.000	165.000
1 Bk.	Baterai ABC Alkaline	49.000	49.000
1 Bk.	Ribbon Cartridge 5015086	175.000	175.000
1 Bk.	Ribbon Cartridge 7754	110.000	110.000
2 Film	CD Folio WESNU	27.000	54.000
1 Bk.	Lem Cendrawasih	72.500	72.500

Tanda terima,

PERHATIAN
Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar / dikembalikan kecuali ada perjanjian.

Total Rp.

4.476.800

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat

PERHATIAN :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2000, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan

Jember tg: 14 Maret 20 02

Pemungut Pajak / Bendaharawan

Tanda Tangan: 
 Nama: Jelas
 Cap Pemungut / Kantor/Instansi: **MUNAWAR**
 Kasi Operasional

Pemungut

Kusa

DIISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diteliti	Direkam	Rik Sederhana	Rik Lengkap	Berkas (arsip)

Tepat waktu

Terlambat



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)**

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

Jember

PWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : CV. Asi Cemerlang

Alamat WP : Jl. Kalimantan 80 A Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Uraian Pembayaran *) PPN DN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun			
<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>			
2	0	0	2

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Diisi dengan pembayaran rupiah penuh Rp. 447.700,-	Terbilang : =Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh= Diisi dengan huruf =Ratus Rupi h=
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

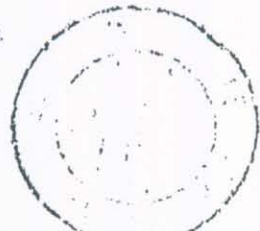
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : **MU FARIDA A**

Wajib Pajak/Penyetor
tgl. 07 Maret 2002
Cap dan tanda tangan

ABDUL KHALIK
Pny. Akunt. & Pelaporan

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 dan tambahan informasi :
 Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
 Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.*



ASTRA international

AUTO 2000

**KUITANSI BENGKEL
REGULER**

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk. - TOYOTA
(00)Jl. Hayam Wuruk No. 34
JEMBER
Telp. (0331) 422000

Nomor : 200821
Tanggal : 28/02/2002
Jam : 09:56:39

Nama : YKP-BANK TABUNGAN NEGARA PUSAT		Alamat : JL. KESEHATAN No. 58 JAKARTA - PUSAT		Telp. :
No. Polisi : B 1438 K	No. Rangka : AE111-09519801	No. PKB : 201106	WAB	
Tipe : COROLLA	No. Mesin : 4A-L321690	Tgl PKB : 27/02/2002	T	
	Odometer : 189579	Jam PKB : 14:21:20		
BIAYA JASA (Nota No. 200757)		Rp.	7.561.000	
PEMAKAIAN BARANG (Nota No.)		Rp.	0	
TERBILANG : <i>Tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah.</i>		JUMLAH	: Rp. 7.561.000	
		UANG MUKA	: Rp. 0	
		METERAI	: Rp. 6.000	
		NILAI KUITANSI	: Rp. 7.567.000	
- Kuitansi dianggap sah bila dibubuhi meterai secukupnya dan sudah dicap/standalangan. - Jaminan pekerjaan berlaku: General Repair-->15 hari atau 1000 Km mana yang tercapai lebih dahulu, Engine Overhaul 1 bulan, dan untuk Penggantian 3 bulan. - Kami tidak bertanggungjawab atas hilang atau terbuangnya suku cadang bekas bila tidak diambil dalam waktu 2 hari sejak tanggal perbaikan.				
(I) BENGKEL KAMI MENYEDIKAN TMS (TOYOTA HOME SERVICE) YANG SIAP MELAYANI SERVICE KENDARAAN (N) DI RUMAH ANDA TANPA DIPUNGUT BIAYA TAMBAHAN (F) HUB TELP. (0331) 422000 DGN. PETUGAS TMS			Meterai Rp. 6000,- M PETER HIDAYATULLAH	

www.asra.co.id

FB 002/09/2000

ASTRA international

AUTO 2000

NOTA JASA

Pol. B 1438 K

NPWP / PKP : 01.302.584.6-626.001 11/09/89
Jl. Hayam Wuruk No. 34, JEMBER

Nomor : 200757
Tanggal : 28/02/2002
PKB No. : 201106

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk. - TOYOTA
(80)Jl. Hayam Wuruk No. 34
JEMBER
Telp. (0331) 422000

Hal : 1 dari 1

Nama : YKP-BANK TABUNGAN NEGARA PUSAT		Alamat : JL. KESEHATAN No. 58 JAKARTA - PUSAT		Telp. :
No.	PEKERJAAN	HARGA		
1	REPAIR BODY	872.727		
2	ALL BODY PAINT	6.000.909		
TERBILANG : <i>Tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah.</i>		JUMLAH HARGA	: Rp. 6.873.636	
		P P N	: Rp. 687.364	
		NILAI NOTA	: Rp. 7.561.000	
(I) BENGKEL KAMI MENYEDIKAN TMS (TOYOTA HOME SERVICE) YANG SIAP MELAYANI SERVICE KENDARAAN (N) DI RUMAH ANDA TANPA DIPUNGUT BIAYA TAMBAHAN (F) HUB TELP. (0331) 422000 DGN. PETUGAS TMS			M. Peter. Hidayatullah M PETER HIDAYATULLAH	
Berlaku Sebagai FAKTUR PAJAK SEDERHANA				

FB 002/09/2000



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

Jember

PWP 0 - - - - *Diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PT. Astra Internasional Tbk. - Toyota

Alamat WP : Jl. Hayam Wuruk No. 31 Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

Uraian Pembayaran *)

PPN 21%

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Seloran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Tahun

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	<input checked="" type="checkbox"/>	Feb	<input checked="" type="checkbox"/>	Mar	<input type="checkbox"/>	Apr	<input type="checkbox"/>	Mei	<input type="checkbox"/>	Jun	<input type="checkbox"/>	Jul	<input type="checkbox"/>	Agst	<input type="checkbox"/>	Sep	<input type="checkbox"/>	Okt	<input type="checkbox"/>	Nov	<input type="checkbox"/>	Des	<input type="checkbox"/>
-----	-------------------------------------	-----	-------------------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	------	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk seloran masa. final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. 687.364.-

Terbilang

Diisi dengan huruf

=Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga=

=Ratus Enam Puluh Empat Ratus=

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

Jember tgl. 07 Maret 2012

Cap dan tanda tangan



ABDUL KHALIK

Nama Jelas : Peny. Akunt. & Pelaporan

Nama Jelas :

ATI FARIDA A
NIP. 9632373

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

Jember

PWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : Fathrahman, Sli

Alamat WP : Jl. A Yani Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	PPN DR
<small>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</small>		

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud
												<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small>	Terbilang <small>Diisi dengan huruf</small>
Rp. 181.819,-	=Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus= =Sembilan Belas Ratus= =

Ruang Teraan
Dilera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SIH FAHIDA
Tempat 962939739

Wajib Pajak/Penyetor
Jember tgl. 07 Maret 2002

Cap dan tanda tangan

ABDUL KHALIK
Pcny, Akunt, & Pelaporan

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
Tambahkan Informasi :
Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

PDIP.5.1-98



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Jember

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : Daniel C. Iskandar, SH

Alamat WP : Jl. A Yani Jember

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	PPN DN

Diisi sesuai daftar pada halaman L belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
-----	----------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan


Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp. 327.273,-	Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i> =Tiga Ratus Dan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus= =Tujuh Puluh Tiga Rupiah=
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor 2002 Jember tgl. <i>Cap dan tanda tangan</i>  Nama Jelas : <u>ABDUL KHALIK</u> <i>Prny. Akunt. & Pelaporan</i>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
 Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Jember

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

PWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : Harry Wirsono, Sli

Alamat WP : Jl. Basuki Rahmat 148 Banyuwangi

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	Uraian Pembayaran *) PPN DN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran Diisi dengan pembayaran rupiah penuh Rp. 443.181,-	Terbilang Diisi dengan huruf =Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus= =Delapan Puluh Satu Ribu =
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruang Teraan
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : **STI PAENIA, A.**
NIP. 96329769

Wajib Pajak/Penyetor
Jember, 07 Maret 2002

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : **ABDI KHALIK**
Peny. Akunt. & Pelaporan

*Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
Tambahan Informasi :
husus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
husus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.*

PDIP.5.1-98

